



YENI HURIANI  
ENCEP DULWAHAB  
NABLURRAHMAN ANNIBRAS

STRATEGI PENGUATAN EKONOMI PEREMPUAN BERBASIS KELUARGA

LekKaS

YENI HURIANI  
ENCEP DULWAHAB  
NABLURRAHMAN ANNIBRAS

# STRATEGI PENGUATAN EKONOMI PEREMPUAN BERBASIS KELUARGA

LekKaS

**LekKaS**

Penerbit Lekkas

Bandung, Indonesia

☎ 0895-2052-4420 ✉ [lekkas.publisher@gmail.com](mailto:lekkas.publisher@gmail.com)

🌐 <https://www.lekkas.id> @lekkas.id

📘 <https://www.facebook.com/lekkas.publisher>

🛒 <https://shopee.co.id/lekkas.publisher>



9 786236 1207390

Yeni Huriani  
Encep Dulwahab  
Nablurrahman Annibras

**STRATEGI PENGUATAN  
EKONOMI PEREMPUAN BERBASIS  
KELUARGA**

Lekkas  
BANDUNG  
2021

## **STRATEGI PENGUATAN EKONOMI PEREMPUAN BERBASIS KELUARGA**

Penulis: Yeni Huriani, Encep Dulwahan, Nablurrahman Annibras

Editor: M. Taufiq Rahman

Layout & Desain Cover: lekkas

©2021 **Yeni Huriani, Encep Dulwahan, Nablurrahman Annibras**

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Diterbitkan pertama kali oleh

**Lekkas bekerjasama dengan FKP2B Press**

Bandung, Juli 2021

**ISBN. 978-623-6207-39-0**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

tentang HAK CIPTA

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah rupiah).

Cetakan 1: Juli 2021

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau keseluruhan isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit, kecuali kutipan kecil dengan menyebutkan sumbernya yang layak.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji hanya untuk Allah yang telah memberi kekuatan kepada Tim Pengkaji *Strategi Penguatan Ekonomi Perempuan Berbasis Keluarga* dalam menyelesaikan tugas yang diamanahkan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. yang telah memberi teladan dan ajaran bahwa menjadi manusia yang mulia adalah sebagai pemberi manfaat kepada manusia lain dan semesta.

Kerja kajian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi strategi penguatan ekonomi perempuan, yang dalam kehidupannya masih jauh tertinggal dari laki-laki dan diharapkan dapat menjadi landasan kebijakan bagi penguatan ekonomi perempuan di Jawa Barat yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan lebih implementatif.

Selama proses kajian banyak kendala yang dihadapi. Tapi semua dapat teratasi berkat bantuan fasilitas struktural yang dimiliki Setda Provinsi Jawa Barat. Untuk itu kami (Tim Kajian) sangat berterima kasih kepada Kepala Subbag Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Masyarakat Desa Bagian Penanggulangan Masalah dan Pemberdayaan Sosial Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya yang memfasilitasi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan Tim.

Tak ada gading yang tak retak. Demikian pula dengan hasil kajian ini. Semoga segala kekurangan dapat dimaklumi dan ada manfaatnya bagi kemajuan perempuan khususnya dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya.

Bandung, Agustus 2021

Para Penulis

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.....	7
2.2. Keluarga.....	19
BAB III METODOLOGI KAJIAN.....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1. Kondisi Objektif Jawa Barat.....	29
4.2. Kondisi Keluarga di Jawa Barat.....	35
4.3. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Jawa Barat.....	42
4.4. Pembahasan.....	56
BAB V PENUTUP.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	77
TENTANG PENULIS.....	83

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pada tahun 2017 Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mensurvey mengenai jumlah laki-laki dan perempuan. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah laki-laki sedikit di atas jumlah perempuan. Persentasenya, yakni 50,24 persen laki-laki dan 49,76 persen perempuan. Namun jumlah perempuan yang hampir sama dengan jumlah laki-laki ini, tidak sebanding dengan jumlah perempuan yang bekerja. Jumlah pekerja perempuan masih di bawah pekerja laki-laki. Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dari tahun 2011 sampai 2015 bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berkisar antara 49 persen perempuan dan 51 persen laki-laki.

Kemudian pada tahun 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pekerja perempuan meningkat sebesar 2,33 persen, jadi persentasenya 55,04 persen yang sebelumnya 52,71 persen pada tahun 2016. Hal itu berarti perempuan Indonesia semakin aktif mengambil bagian dalam mendukung perekonomian nasional, dan memiliki kesempatan yang sama dalam bekerja.

Adanya peningkatan jumlah perempuan Indonesia yang bekerja didukung hasil riset Grant Thornton tahun 2017, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai peningkatan jumlah perempuan yang menduduki posisi senior di perusahaan. Peningkatan 24 persen di tahun 2016 menjadi 28 persen di tahun 2017. World Bank juga menjelaskan, bahwa secara global tingkat partisipasi

angkatan tenaga kerja perempuan mengalami peningkatan, meskipun peningkatannya tidak signifikan.

Bagaimana dengan jumlah tenaga kerja perempuan dan partisipasi angkatan tenaga kerja perempuan Jawa Barat? Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa ketenagakerjaan di Jawa Barat, hasilnya menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih ada kesenjangan antara tenaga kerja laki-laki dengan tenaga kerja perempuan.

Pada Agustus 2017, TPAK laki-laki sebesar 82,40 persen, sementara TPAK perempuan hanya sebesar 43,89 persen. Dibanding kondisi setahun yang lalu, tahun 2016, TPAK laki-laki maupun perempuan dua-duanya mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 1,78 persen laki-laki dan 3,59 persen perempuan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya tenaga kerja perempuan, seperti perempuan yang lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah yang tidak dibayar, sehingga waktunya habis di rumah. Dalam satu hari perempuan bisa mengerjakan pekerjaan tidak dibayar. Dari pagi sampai pagi lagi. Perempuan cenderung menggeluti pekerjaan tanpa bayaran yang setimpal. Bidang pekerjaan itu antara lain memasak, mengurus rumah, mengurus anak-anak, lansia, dan lain sebagainya (Setyowati, 2018).

Mengenai fenomena ini, Wahyuni (1990) menambahkan bahwa perempuan dominan di sektor informal, baik di desa maupun di kota, dan perempuan berkonsentrasi dalam suatu aktivitas di sektor informal yang sempit dengan imbalan yang rendah.

Selain faktor tadi, faktor lainnya ialah perempuan memiliki keterbatasan, seperti rendahnya pendidikan, keterampilan yang kurang, sedikitnya kesempatan kerja, dan hambatan ideologis perempuan yang terkait dengan rumah tangga. Perempuan juga dihadapkan pada kendala tertentu, yang dikenal dengan istilah *triple burden of woman*, yaitu perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi, dan fungsi sosial di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kesempatan perempuan untuk memanfaatkan peluang



dan mengoptimalkan kemampuannya menjadi sangat terbatas.

Faktor lainnya ialah rendahnya pendidikan perempuan. Dengan pendidikan yang rendah, perempuan cenderung tertinggal dan tidak memiliki pekerjaan yang layak, dibuktikan dengan berbagai hasil penelitian, seperti SMERU, IWAPI dan kementerian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki wawasan dan berpendidikan lebih baik akan sangat optimis terhadap masa depannya. Di samping itu, mereka pada umumnya lebih mandiri dan bisa menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang dihadapinya.

Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa perempuan dengan tingkat pendidikan yang tinggi, ternyata menjadi faktor penentu dalam mengakses informasi, dan bisa mengakses berbagai layanan untuk melakukan usaha ekonomi (Saleha & Tirtariandi, 2015).

Kalaupun perempuan yang bekerja, tetapi mendapatkan gaji yang lebih rendah dari laki-laki. Sebagaimana ditunjukkan dari hasil penelitian White (Susilo, 2010), menunjukkan bahwa berdasarkan lingkungan kerjanya, tenaga kerja perempuan seringkali masih dianggap sebagai tenaga kerja nomor dua (sekunder) sehingga seringkali berdampak pada diskriminasi pengupahan. Masih sering terjadi di berbagai sektor pekerjaan, upah tenaga kerja perempuan diperlakukan diskriminatif dan tidak sebanding dengan resiko serta beban pekerjaannya.

Permasalahan mendasar lainnya dan menjadi faktor yang menghambat dalam pemberdayaan perempuan ialah masalah *gender*. Perlu disadari kesadaran gender (*gender awareness*) tidak dapat sekaligus dimengerti dan dilaksanakan oleh masyarakat. Penyadaran *gender* perlu waktu dan perubahan pola pikir dan tingkah laku, sehingga diperlukan kesabaran dan ketekunan untuk mengubah kultur dan kebiasaan masyarakat. Permasalahan yang sering timbul muncul karena terdapatnya friksi antara kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya yang menyangkut tugas dan fungsi perempuan.

Khusus mengenai *gender* ini, menurut Musdah Muslia (2011), menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya menyangkut kedudukan dan peran perempuan mengacu

pada dua hal pokok, *pertama*, meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan *gender*. *Kedua*, meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Pemberdayaan perempuan ini telah menjadi komitmen internasional, sebagaimana tertuang dalam United Nation Millenium Declaration (2000), di antaranya memuat satu rekomendasi penting untuk diterapkan di semua negara yaitu: "*to promote gender equality and empowerment of women as effective ways to combat poverty, hunger and disease and to stimulate development that is sustainable*" (dalam Darwin, 2005). Komitmen internasional tersebut menegaskan pentingnya upaya mewujudkan kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan sebagai cara efektif untuk mengeliminasi kemiskinan, kelaparan, penyakit serta untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Faktor lainnya yang menyebabkan lemahnya perempuan dalam menopang ekonomi keluarga, adalah kurangnya informasi mengenai peluang-peluang pekerjaan dan dana atau modal usaha yang bisa dan mudah diakses oleh perempuan.

Sarana informasi ini merupakan salah satu media untuk kaum perempuan dalam memperoleh akses pekerjaan dan lainnya yang bisa menopang ekonomi. Seperti yang dikatakan Nugroho (dalam Susilo, 2010), bahwa pekerja wanita lemah aksesnya terhadap modal, teknologi, dan pasar.

Sarana informasi memberikan khazanah dan wawasan baru bagi kaum perempuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Informasi ini tidak hanya berupa kata-kata yang tertulis, namun dapat pula diperoleh melalui komunitas, diskusi kelompok dan grup aktifitas lainnya yang secara mandiri ataupun bentukan pemerintah.

Faktor berikutnya ialah kurangnya pendamping, juru penerang atau penyuluh yang dapat memberikan advokasi atau penyebar informasi yang bermanfaat secara terus-menerus untuk kaum perempuan, menjadikan begitu susahnyanya upaya perempuan untuk bisa menerima dan ikut di dalam perubahan sosial dan upaya-upaya pemerintah lainnya. Ketidakefektifan dan lambatnya dampak dari intervensi menjadi sesuatu yang lazim ditemukan dari tahun ke tahun sehingga memberikan efek yang lebih panjang untuk pemberdayaan perempuan.

Mengenai rendahnya partisipasi perempuan Jawa Barat di dalam dunia kerja, pemerintah Jawa Barat sudah melakukan upaya-upaya strategis, seperti pembentukan Motekar dan Tenaga Penyuluh Desa (TPD). Kemudian ada program PEKKA yang dimulai pada Desember 2001 dengan visi pemberdayaan perempuan kepala keluarga. PEKKA ini merupakan organisasi yang mengorganisir dan memfasilitasi perempuan kepala keluarga, agar mampu meningkatkan kesejahteraannya, memiliki akses terhadap berbagai sumber daya, mampu berpartisipasi aktif pada setiap siklus pembangunan di wilayahnya, memiliki kesadaran kritis akan haknya sebagai manusia dan warga negara, serta mempunyai kontrol terhadap diri dan proses pengambilan keputusan baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat.

Namun program-program atau strategi yang sudah dijalankan ini masih jauh dari harapan. Partisipasi perempuan dalam bekerja di Jawa Barat masih rendah, sehingga tidak bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Oleh karena itu dibutuhkan kajian yang mendalam mengenai program dan strategi baru yang bisa membantu mempercepat upaya pemberdayaan ekonomi keluarga. Karena pada prinsipnya, perempuan sebagaimana dikatakan Chambers (1987) memiliki misi utama, yaitu mengembangkan kemandirian, keswadayaan masyarakat terhadap sumber daya internal lingkungan agar bisa terhindar dari ketidaktahuan, kemiskinan, keterbelakangan, kelemahan fisik, kerentanan ke dalam perangkap yang mematikan peluang hidup masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas, ada beberapa permasalahan yang menjadi kajian ini, yaitu:

1. Bagaimana kondisi keluarga di Jawa Barat?
2. Bagaimana posisi perempuan Jawa Barat dalam sektor Ekonomi?
3. Alternatif apa yang mungkin dilakukan perempuan Jawa Barat guna meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga?

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata *empowerment*. Menurut Webster dan Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung pengertian *to give power or authority to*, yang artinya sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain (Pranarka & Priyono, 1996).

Selanjutnya Pranarka dan Priyono (1996) menjelaskan:

Pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya, dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Sementara itu, menurut Sulistyani (2004) bahwa secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata dasar, yaitu daya, yang berarti kekuatan atau kemampuan. Jadi pemberdayaan sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Konsep pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan paradigma baru dalam pembangunan yang lebih mengasentuasikan sifat-sifat *people centered, participatory improving sustainable* (Kartasasmita, 1996). Konsep ini sudah dikembangkan oleh para

ahli dan praktisi, sebagai upaya untuk mencari apa yang dikatakan Friedman (dalam Kartasasmita, 1996), disebut sebagai *alternative development* yang menghendaki *inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and inter-generational equality*.

Menurut Gunawan Sumodiningrat, bahwa pengertian pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi (dalam Nugroho, 2008) yaitu, *pertama*, pemberdayaan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi individu dan masyarakat berkembang. Sisi ini memperlihatkan bahwa setiap individu maupun masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan untuk mengatasi permasalahan, maupun meningkatkan kesejahteraan individu maupun masyarakat.

*Kedua*, pemberdayaan adalah untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki individu maupun masyarakat. Sisi kedua ini lebih ditekankan pada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pemanfaatan potensi yang dimiliki individu maupun masyarakat. Penguatan potensi yang dimiliki ini tidak hanya penguatan pada potensi yang dimiliki oleh individu maupun masyarakat, tetapi juga penguatan-penguatan terhadap institusi-institusi yang ada dalam masyarakat. Penguatan potensi individu maupun masyarakat juga berhubungan dengan partisipasi yang diberikan individu maupun masyarakat, dalam menentukan dan mengambil keputusan yang menyangkut dirinya sendiri maupun masyarakatnya.

*Ketiga*, pemberdayaan merupakan perlindungan. Pemberdayaan harus diarahkan untuk memperkuat pihak-pihak atau individu-individu yang dianggap lemah, sehingga menjadi lebih kuat. Pemberdayaan harus memperlihatkan adanya pemihakan terhadap yang lemah tanpa mengisolasinya. Melindungi dalam pemberdayaan juga harus mengupayakan dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menghindari terjadinya eksploitasi dari pihak atau individu yang kuat terhadap yang lemah. Dengan demikian pemberdayaan harus menekankan pada kerja keras individu maupun masyarakat, sehingga dapat mengatasi masalah yang dihadapi maupun mengembangkan potensi yang ada.

Kalau melihat pengertian pemberdayaan yang diberikan Gunawan, pemberdayaan perempuan berarti menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi perempuan berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki perempuan, dan melindungi perempuan.

Adapun tujuan dari pemberdayaan perempuan ialah untuk menantang ideologi patriarki, yaitu: *pertama*, adanya dominasi laki-laki atas perempuan, khususnya dalam keluarga. *Kedua*, mengubah struktur dan institusi yang dapat memperkuat dan melestarikan diskriminasi *gender* dan ketidaksamaan sosial, khususnya dalam keluarga. *Ketiga*, memberi kemungkinan bagi perempuan untuk dapat mengakses kepada dan penguasaan terhadap sumber-sumber material ataupun informasi (Eddyono et al., 2006).

Sementara menurut Rian Nugroho (2008), tujuan dari pemberdayaan perempuan di antaranya:

1. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini.
2. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
3. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha, baik skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar, untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.
4. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

Mengenai pemberdayaan perempuan Moser (1989) mengingatkan akan kodrat perempuan yang harus menghargai dan menghormati laki-

laki. Pemberdayaan perempuan bukan sebagai upaya mengalihkan posisi dan peran perempuan dari peran dan posisi laki-laki. Tetapi bagaimana mengangkat dan meninggikan derajat perempuan. Lebih jauh Moser mengatakan bahwa inti dari strategi pemberdayaan perempuan, sesungguhnya bukan bermaksud menciptakan perempuan yang lebih unggul daripada kaum laki-laki. Pendekatan pemberdayaan ini kendati menyadari pentingnya meningkatkan kekuasaan perempuan, namun pendekatan ini lebih berupaya untuk mengidentifikasi kekuasaan, bukan sekedar dalam kerangka dominasi yang satu terhadap yang lain, melainkan lebih dalam kerangka kapasitas perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal.

Untuk mencapai tujuan dan meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlu strategi dan langkah-langkah efektif sehingga cepat dan tepat dalam melakukannya. Gunawan Sumodiningrat (dalam Nugroho, 2008) menerangkan bahwa melakukan pemberdayaan perempuan perlu tiga langkah yang berkesinambungan, yaitu:

1. Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan daripada laki-laki.
2. Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat.
3. Perlindungan, artinya mendapatkan proteksi dari kekerasan dan ketidakadilan.

Selain langkah-langkah di atas, bisa juga menggunakan langkah-langkah pemberdayaan perempuan yang diberikan IMF yang dikutip oleh Herri dkk (2009), bahwa ada lima langkah dalam pemberdayaan perempuan, di antaranya:

1. Membantu dan mendorong kaum perempuan untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan serta kompetensi diri mereka melalui berbagai program pelatihan.
2. Membantu kaum perempuan dalam strategi usaha dan pemasaran produk.
3. Memberikan pemahaman terhadap regulasi dan peraturan



- pemerintah terkait dengan legalitas dunia usaha.
4. Mendorong dan membantu kaum perempuan untuk mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.
  5. Membuat usaha mikro, jaringan usaha mikro perempuan, forum pelatihan usaha.

Kemudian Hikmat (2004) memberikan dua strategi dalam pemberdayaan perempuan, yang pada prinsipnya hampir sama dengan dua strategi pemberdayaan perempuan yang sudah dikemukakan di atas, yaitu: *Pertama*, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada perempuan, agar perempuan menjadi lebih berdaya (*survival of the fittes*). Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian perempuan melalui organisasi. *Kedua*, proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar perempuan mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Berdasarkan ketiga pendapat para pakar di atas mengenai strategi dan langkah dalam pemberdayaan perempuan, setidaknya bisa dirangkum menjadi beberapa tahapan dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, yaitu: a peningkatan akses bantuan modal usaha kepada perempuan; b peningkatan akses pengembangan SDM untuk perempuan; dan c peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi perempuan; d. peningkatan perlindungan kepada perempuan.

Pemberdayaan perempuan intinya adalah meningkatkan kemandirian perempuan. Dalam teori feminisanya Rosemerie (dalam Achmad, 1994), bahwa untuk menjadi perempuan yang mandiri dengan cara menciptakan yang baru bagi keberadaan perempuan, menghapuskan yang tidak sesuai bagi perempuan, serta mereformasi yang tidak lurus bagi perempuan.

Widaningroem dan kawan-kawan (1999) bahwa strategi pemberdayaan perempuan ialah dengan membentuk kelompok usaha.

Hal ini untuk meminimalkan persaingan di antara perempuan dan memperkuat modal dalam kelompok. Faktor pendukung peningkatan peranan perempuan dalam kelompok usaha adalah perempuan memiliki kemampuan kerja yang tinggi, dorongan keluarga cukup kuat.

Kartasasmita (1996) membagi tiga macam upaya pemberdayaan, yaitu: *pertama, enabling*, yaitu proses menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pada proses ini titik tolaknya adalah setiap perempuan memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Potensi yang ada tersebut berupaya dibangun, didorong dan dimotivasi serta dibangkitkan kesadaran akan potensi yang mereka miliki. *Kedua, empowering*, yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Penguatan meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan input dan pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. *Ketiga, protecting*, yaitu upaya mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Berhasil tidaknya strategi pembedayaan perempuan bisa dilihat pada beberapa indikator pemberdayaan perempuan yang dikembangkan Schuler, Hashemi dan Riley (dalam Girvan, 2004), berikut ini, yaitu :

1. Kebebasan mobilitas, yaitu kemampuan perempuan untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas dianggap tinggi jika perempuan mampu untuk pergi sendiri.
2. Kemampuan membeli komoditas “kecil”, yaitu kemampuan perempuan untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga dan kebutuhan sehari-hari untuk dirinya. Perempuan dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika perempuan dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih lagi jika perempuan tersebut dapat membeli komoditas tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
3. Kemampuan membeli komoditas “besar”, yaitu kemampuan

individu atau perempuan untuk membeli barang-barang yang bersifat sekunder atau tersier, tanpa meminta izin pasangannya dan lebih tinggi lagi jika menggunakan uang sendiri dalam membeli komoditas tersebut.

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga, yaitu mampu untuk membuat keputusan sendiri maupun bersama suami mengenai keputusan-keputusan keluarga.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga. Perempuan di dalam keluarga tidak dalam posisi subordinat dari kaum laki-laki.
6. Kesadaran hukum dan politik, contohnya dapat menyebutkan para pemimpin masyarakatnya, mengetahui pentingnya mempunyai surat nikah dan hukum waris, terlindungi secara hukum dan politik.
7. Keterlibatan dalam kegiatan politik praktis. seperti ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, menentukan hak suara tanpa ada intervensi dari pasangan.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga seperti memiliki tempat tinggal, asset produktif, tabungan.

Selanjutnya dalam rangka menganalisis konsep pemberdayaan perempuan berhasil atau tidak, Sukesri (1999) membangun lima dimensi dalam menguji keberhasilan pemberdayaan perempuan, yaitu: (1) kesejahteraan, apakah perempuan sudah sejahtera atau belum? (2) akses atas sumber daya. Apakah perempuan sudah bisa mendapatkan akses informasi mengenai usaha atau modal belum?; (3) kesadaran kritis. Apakah perempuan sudah berfikir dan bertindak kritis belum dalam peran dan fungsinya sebagai perempuan di tengah-tengah masyarakat? (4) partisipasi. Apakah perempuan sudah berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari di rumah atau pun lingkungan tempat tinggalnya? dan (5) kontrol. Bagaimana hasil akhir dari setiap proses pemberdayaan perempuan ini?

Dalam hal ini kaum perempuan harus ikut serta dalam pembangunan, termasuk dalam pembangunan pedesaan. Masalah pembangunan pedesaan sering disamakan dengan pengurangan

kemiskinan. Meskipun definisi kemiskinan berbeda-beda, kemiskinan pendapatan digunakan sebagai pedoman umum dalam mendefinisikan kemiskinan. Dalam hal “tiga perempat dari kelompok miskin tinggal di daerah pedesaan”, “miskin (kemiskinan)” menunjukkan kondisi yang dihasilkan dari kemiskinan pendapatan. Peningkatan mata pencaharian adalah komponen utama dari pembangunan pedesaan.

Ada juga pendapat, yang semakin menjadi arus utama, bahwa standar kehidupan tidak dapat diukur dengan pendapatan dan konsumsi, tetapi membutuhkan pandangan yang lebih luas. Bagi mereka yang mendukung argumen ini, kepuasan Kebutuhan Dasar Manusia (BHN) diperlukan untuk meningkatkan standar hidup (Ferrant & Thim, 2019). Juga, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) telah menggunakan Indikator Pembangunan Manusia (IPM), yang didasarkan pada harapan hidup, tingkat melek huruf, rasio partisipasi bruto, dan PDB per kapita dalam Laporan Pembangunan Manusia sejak 1990.

Dalam Pedoman OECD/DAC tentang Pengurangan Kemiskinan, kemiskinan digambarkan sebagai kurangnya lima kemampuan berikut.

1. Kemampuan ekonomi: untuk mendapatkan penghasilan, untuk mengkonsumsi, dan memiliki asset.
2. Kemampuan manusia: memiliki akses ke perawatan kesehatan, pendidikan, nutrisi yang cukup, air bersih, dan kondisi kehidupan yang higienis.
3. Kemampuan politik: hak asasi manusia, untuk berpartisipasi dalam politik dan proses pembuatan kebijakan, dan untuk dapat memiliki pengaruh pada pengambilan keputusan.
4. Kemampuan sosial-budaya: untuk berpartisipasi sebagai anggota masyarakat yang dihargai dengan status sosial dan martabat.
5. Kemampuan perlindungan: untuk mencegah kerentanan dari kerawanan pangan, penyakit, kejahatan, perang, dan konflik.

Seperti dijelaskan di atas, langkah-langkah komprehensif sangat penting untuk pendekatan multidimensi dalam pengentasan kemiskinan. Jumlah organisasi bantuan yang memandang

pembangunan pedesaan yang komprehensif sebagai pendekatan yang efektif dalam meningkatkan mata pencaharian masyarakat pedesaan telah meningkat. Misalnya, pengembangan pertanian membutuhkan peningkatan konsumen, pengembangan industri, dan peningkatan infrastruktur, dan produktivitas penduduk melalui ekspansi, pendidikan, layanan perawatan kesehatan memiliki banyak pengaruh pada kondisi tersebut. Juga, penting untuk melestarikan lingkungan melalui manajemen sumber daya dan pencegahan bencana alam. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk membantu berbagai kegiatan melalui pendekatan *cross-sectional*. Singkatnya, pembangunan pedesaan berkaitan dengan isu-isu multi-sektoral, seperti infrastruktur, perawatan kesehatan dan kebersihan, pendidikan, lingkungan dan pemerintahan serta generasi pendapatan lokal.

Pembangunan pedesaan bertujuan untuk meningkatkan mata pencaharian dengan menerapkan pembangunan komprehensif untuk daerah pedesaan di mana mayoritas orang miskin hidup. Pembangunan pedesaan juga dapat berkontribusi untuk mengurangi kemiskinan di daerah perkotaan dengan mengurangi masuknya populasi yang berlebihan dari daerah pedesaan.

a. *Pembangunan Makro*

Meskipun teori *trickle-down* didasarkan pada keyakinan bahwa ekonomi makro yang diperluas dapat meningkatkan standar hidup orang-orang miskin, efektivitasnya dipertanyakan. Namun kegagalannya tidak berarti bahwa upaya harus dipusatkan pada tingkat akar rumput saja. Ini karena pengembangan daerah pedesaan tidak dapat dicapai tanpa memperhatikan daerah perkotaan, yang merupakan konsumen utama produk pertanian. Jika proyek pembangunan konvensional efektif, kemiskinan pedesaan akan meningkat lebih signifikan. Oleh karena itu, jelas bahwa pendekatan pembangunan pedesaan tradisional perlu ditingkatkan.

Sampai sekarang, pembangunan pedesaan bergantung pada bantuan eksternal dari negara asing. Namun input eksternal telah ditahan karena kondisi keuangan donor yang buruk saat ini.

Akibatnya, promosi pembangunan pedesaan membutuhkan input eksternal yang efektif untuk menghasilkan hasil yang cukup dan mampu menghasilkan perbaikan lebih lanjut. Oleh karena itu masalah pembangunan harus dipahami secara komprehensif dan lintas seksi agar hal ini dapat direalisasikan. Penggunaan sumber daya manusia dan material secara maksimal di daerah pedesaan juga diperlukan.

#### *b. Pembangunan Masyarakat Lokal*

Yang pertama adalah pembangunan masyarakat lokal. Pembangunan tipe ini bertujuan:

1. Untuk menekankan pengembangan lokal yang komprehensif untuk advokasi hak asasi manusia, pembangunan manusia dan kemajuan kualitatif standar kehidupan berdasarkan konservasi lingkungan dan pembangunan sosial berkelanjutan.
2. Untuk mengadopsi pendekatan pembangunan yang mempromosikan hubungan antar-industri melalui pemanfaatan komprehensif sumber daya lokal, teknik, industri, sumber daya manusia, budaya, dan jaringan yang memberi nilai pada situasi kerja ekonomi campuran. Juga, untuk menerapkan peraturan dan instruksi yang diperlukan untuk mempromosikan kerja sama antara kota dan ekonomi lokal.
3. Untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Untuk membangun otonomi lokal melalui partisipasi masyarakat, desentralisasi dan pemerintahan mandiri penduduk. Pada saat yang sama, untuk mengembangkan badan-badan implementasi proyek berdasarkan realitas regional.

#### *c. Pembangunan Partisipatif*

Promosi pengembangan sumber daya manusia dan fisik di daerah pedesaan membutuhkan pengakuan fakta bahwa masyarakat setempat sendiri adalah pelaksana utama proyek pembangunan. Jika orang berpartisipasi secara pasif dalam proyek, mereka menjadi tidak aktif dan akan bergantung pada input eksternal. Untuk menghindari situasi ini, pengambilan keputusan lokal dalam perencanaan dan

implementasi proyek adalah penting. Dengan kata lain, sebuah proyek yang direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat setempat diberi prioritas karena bahan-bahan lokal dan sumber daya manusia dimanfaatkan secara efektif oleh inisiatif dan tanggung jawab masyarakat setempat. Kemandirian lokal dan pengembangan hasil proyek yang berkelanjutan ditingkatkan dengan penggunaan sumber daya lokal yang efektif.

#### *d. Pengembangan Kapabilitas Ekonomi*

Pendapatan masyarakat lokal perlu ditingkatkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kegiatan menghasilkan pendapatan dapat dibagi menjadi pendapatan pertanian dan non-pertanian.

Karena sebagian besar masyarakat lokal memperoleh pendapatan dari pertanian, peningkatan pendapatan melalui peningkatan produktivitas pertanian dan pemasaran produk pertanian harus dipertimbangkan ketika melaksanakan pembangunan pedesaan. Pendapatan pertanian dapat ditingkatkan melalui dua metode utama:

- 1) menstabilkan harga produk pertanian dan mengurangi eksploitasi perantara (misalnya pembangunan jalan pengumpan atau perbaikan pasar)
- 2) meningkatkan produktivitas pertanian (misalnya tanaman ganda, pengenalan teknik pertanian, dan peningkatan infrastruktur pertanian seperti sistem irigasi).

JICA (Japan International Cooperation Agency), misalnya, telah terlibat dalam proyek peningkatan pendapatan terutama berfokus pada petani swasembada skala kecil. JICA melaksanakan proyek-proyek di bawah berbagai skema Jenis Proyek Kerjasama Teknis, Studi Pembangunan, atau Japan Overseas Cooperation Volunteers (JOCV) sebagai berikut:

- 1) pengembangan sistem irigasi skala kecil (pembangunan sistem irigasi dan pengembangan asosiasi pengguna air)
- 2) peningkatan kapasitas penyuluh pertanian (misalnya perbaikan teknik budidaya, peningkatan berbagai tanaman dan sayuran dan

agroforestri)

- 3) pemberdayaan kegiatan pertanian berbasis masyarakat (misalnya organisasi koperasi pengiriman dan distribusi dan bank beras)
- 4) pembangunan pedesaan dan pertanian yang komprehensif (misalnya proyek terpadu dengan pengembangan irigasi skala kecil, peningkatan kapasitas bagi pekerja pertanian, dan penguatan kegiatan pertanian berbasis masyarakat).

Pengembangan irigasi skala kecil adalah proyek umum JICA yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan bagi petani swadaya skala kecil. Sangat penting untuk proyek yang berkelanjutan bahwa petani sendiri memelihara fasilitas irigasi, dan memulihkan dan menginvestasikan kembali biaya investasi awal. Oleh karena itu, pembangunan sarana irigasi harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan pemeliharaan petani dan pemulihan serta investasi modal dengan membandingkan biaya pembangunan sarana irigasi dengan pertumbuhan pendapatan bersih petani di masa yang akan datang. Selain itu, penting untuk melibatkan petani dalam tahap perencanaan proyek untuk pengembangan organisasi administratif untuk fasilitas irigasi, karena sulit untuk memfasilitasi kepemilikan lokal setelah pembangunan infrastruktur tersebut.

Untuk peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, rencana proyek yang didasarkan pada metode pertanian tradisional berisiko rendah sangat diinginkan, karena teknik modern memerlukan risiko teknis dan ekonomis tambahan untuk kelompok miskin. Artinya, meskipun bantuan teknis sering mencoba untuk memperkenalkan teknik modern, kerentanan ekonomi petani skala kecil harus dipertimbangkan ketika memperkenalkan teknik tersebut. Jika ada, perbaikan teknik yang ada sejauh petani dapat menanganinya dan menghasilkan pendapatan dengan meningkatkan produktivitas mereka dapat mengarah pada situasi di mana kepemilikan petani dapat difasilitasi dengan lebih baik dan proyek menjadi sukses.

Partai politik merupakan wadah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Sebagai sebuah organisasi, partai politik pasti tidak akan luput dengan yang mengatasmakan kader untuk maju



dan melanjutkan roda organisasi yang telah dibentuk dengan susah payah. Namun di setiap organisasi, masalah mekanisme pembentukan kader atau rekrutmen terbuka memiliki kebijakan tersendiri. Karena dalam proses kaderisasi banyak yang memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi, untuk itu keberlangsungan organisasi termasuk dalam pembentukan partai politik ini. Namun dengan proses kaderisasi bukanlah masalah yang sederhana. Ini menyangkut pembentukan pemikiran, kepribadian, dan perilaku yang diharapkan organisasi dari anggotanya. Sehingga dalam hal partai politik ini diperlukan suatu cara atau mekanisme yang baik agar dapat mencetak output kader yang diharapkan. Suatu organisasi tidak hanya bertugas untuk merekrut kader baru, tetapi juga berupaya untuk dapat mengukur dominasi ruang pikiran kader yang telah direkrut, untuk menciptakan loyalitas kader terhadap organisasi itu sendiri.

## **2.2. Keluarga**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2014 Pasal 1 menjelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil di dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Hampir sama mengenai pengertian keluarga ini juga dijelaskan oleh UUPKPK yang menyebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Kedua pengertian keluarga ini lebih menjelaskan pada struktur dan komposisi keluarga pada umumnya.

Pengertian keluarga yang lebih komprehensif bisa dilihat dari pengertian Khairudin (2000) yang menjelaskan bahwa keluarga merupakan unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat, yang merupakan landasan dari semua institusi. Kemudian Khairudin menambahkan bahwa keluarga juga merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang memiliki jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan dan adopsi.

Kemudian Wamboldt dan Reiss (1989) menjelaskan mengenai

keluarga:

*Family as networks of people who share their lives over long periods of time bound by ties of marriage, blood, or commitment, legal or otherwise, who consider themselves as family and who share a significant history and anticipated future of functioning in a family relationship* (dalam Galvin & Brommel, 1996).

Pengertian keluarga dari Wamboldt dan Reiss bisa mewakili pengertian keluarga yang lebih lengkap dan bisa merepresentasikan keluarga yang ideal. Keluarga yang tidak hanya terdiri dari anggota keluarga atau struktur anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Tetapi ada ikatan pertalian yang resmi dan sah, yaitu tali pernikahan sehingga turunan-turunannya memiliki ikatan darah.

Tipe keluarga menurut Horton dan Hunt (1996), yaitu: Keluarga inti (*Nuclear family/Conjugal family*) yang terdiri dari ayah, isteri dan anak; keluarga besar (*extended family/Consanguine family atau join family*) yang terdiri dari nenek, kakek, ayah, ibu dan anak; keluarga berantai (*serial family*) yang terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, anak-anak, ponakan dan lainnya yang ikut tinggal dalam satu keluarga; keluarga duda/Janda (*single family*) yang terdiri dari ayah dan anak atau ibu dan anak; keluarga berkomposisi (*composite*), keluarga kabatis (*cohabitation*).

Studi tentang tentang peran keluarga, mulai banyak dilakukan sejak pertengahan abad ke-19. Menurut Faulus Tangdilintin (2005), yang menjadi dorongan utamanya terletak pada perkembangan kehidupan sosial, baik di Eropa maupun Amerika, yang sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan besar dengan pertumbuhan industri modern. Pada saat itu, proses industrialisasi dan urbanisasi berlangsung sangat cepat, sehingga struktur sosial yang baru mulai berkembang, sementara di sisi lain sistem kelas sosial masih berperan. Akibatnya, hak dan tanggungjawab individu terhadap keluarga dan masyarakat, terutama pada masyarakat yang mendasarkan ikatannya pada hubungan-hubungan primer mulai dipertanyakan.

Dalam perkembangannya, studi tentang keluarga ini memunculkan

para penganut perubahan sosial yang dipelopori oleh Chicago School of Sociology yang berupaya memahami eksistensi keluarga, maupun dampak perkembangan perkotaan dan industri pada keluarga. Mereka memperlihatkan bahwa peri kehidupan dengan pola tradisional ambruk karena desakan pengaruh perkotaan. Salah satu tema yang ditampilkan oleh Chicago School adalah mengenai hilangnya fungsi keluarga sebagai akibat urbanisasi. Menurut William F. Ogburn (1886-1959) sebagai pelopornya, menyatakan bahwa ambruknya kebudayaan tradisional berakibat memunculkan tipe kehidupan keluarga yang baru, yang menekankan fungsi-fungsi kepribadian.

Seiring meluasnya pengaruh Chicago School berkembang pula pendekatan baru yang lebih menekankan hubungan-hubungan internal suatu keluarga, yaitu fungsionalisme struktur dan interaksi simbolik. Para penganut paham ini sebenarnya menyetujui pendapat Ogburn bahwa keluarga modern kehilangan banyak fungsi. Namun mereka yakin bahwa keluarga ini bergerak menuju pada kebahagiaan, yang akan terwujud dalam interaksi yang berbentuk "saling memuaskan, saling pengertian, yang penuh simpati dan persahabatan dari anggota-anggotanya.

Pergeseran fungsi keluarga ini menurut Burgess dan Locke adalah dari *institution* ke *companionship*, yaitu pergeseran dari suatu pranata yang berfungsi mengemban mandat masyarakat untuk mempersiapkan warga yang sadar akan peranan dan tanggungjawabnya, menjadi pranata yang sekedar kontrak di antara dua orang untuk saling membahagiakan. Pergeseran ini diperkuat oleh pernyataan Berger dkk., yang meneliti proses modernisasi di dunia ketiga dan pengaruhnya terhadap jalan hidup tradisional, dan dalam realitasnya ia menemukan perubahan pada pola kekerabatan.

Berger (1979) melihat bahwa modernisasi membawa pada bermacam-macam ketidakpuasan yang timbul dari ekonomi yang bersifat teknologik, birokrasi dari pranata-pranata besar dan pluralisasi dari dunia sosial yang menghasilkan *homelessness*.

Berger (1979) dalam pengamatannya mendapatkan fenomena

bahwa dalam setiap masyarakat pada awalnya sebatas menyesuaikan diri dengan modernisasi, tetapi industri modern telah menjadikan mereka hidup terkotak-kotak dimana pada setiap sektor dalam kehidupannya sehari-hari menunjukkan dunia yang sama sekali lain dalam makna dan penghayatannya. Oleh karenanya, Berger (1979), sangat pesimis menghadapi proses modernisasi, namun ia menunjuk keluarga sebagai salah satu pranata yang dapat mengatasi *homelessness* sebagai dampak dari modernisasi.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, pada saat ini telah memiliki pergeseran peran dan fungsi yang begitu signifikan. Pergeseran tersebut sangat mungkin disebabkan oleh banyaknya hasil kajian yang dilakukan oleh para cendekia yang memiliki ketertarikan terhadap keluarga, hasil kajiannya kemudian membangun rumusan dan konsep baru tentang peran serta fungsi keluarga. Selain itu, bisa jadi disebabkan oleh adanya perkembangan variabel atau beberapa aspek yang berhubungan dengan keluarga itu sendiri, sehingga berimplikasi pada pergeseran peran dan fungsi keluarga (Huriani et al., 2021).

Peran keluarga sebagai perilaku diharapkan sesuai dengan tugas dan fungsi seseorang dalam keluarganya, atas dasar kewajiban serta situasi dan kondisi tertentu dalam keluarga maupun lingkungannya. Oleh sebab begitu penting peran dan fungsi keluarga ini, baik bagi anggota keluarga maupun lingkungannya maka seringkali disebutkan bahwa peran dan fungsi keluarga merupakan fondasi utama untuk para anggotanya (Febriyani et al., 2020).

Keluargalah yang mengajarkan seseorang tentang bagaimana cara makan, minum, berpakaian, berbicara, dan bergaul dengan lingkungannya. Keluarga menjadi sekolah pertama yang memberi nilai dan norma, juga membentuk tatapikir, tatarasa, tatasikap, dan tatalaku, bahkan karakter dan prinsip-prinsip hidup seseorang, karena keluarga mengenalkan dan mengajarkan nilai-nilai ajaran agama serta menanamkan pendidikan ibadah di ruang keluarga (Enjang & Dulwahab, 2018).

Tentunya fungsi keluarga tidak sebatas mengenalkan dan mengajarkan nilai-nilai ajaran agama, karena kehadiran keluarga berperan dan berfungsi, yaitu memiliki keturunan, memenuhi makan dan minum, tempat istirahat, tempat berbagi cinta dan kasih sayang, tempat konseling atau terapi, tempat berbagi, pendidikan formal dan informal, *filter* budaya (Enjang & Dulwahab, 2018).

Setiap keluarga pada kenyataannya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik ini disebabkan oleh nilai dan norma, serta keyakinan (agama) yang dianut keluarga, juga oleh perbedaan budaya dan adat istiadat lingkungannya. Karenanya, tidak mengherankan jika keluarga di daerah Sunda, Padang, Batak, Jawa, dan sebagainya tentu memiliki perbedaan karakteristik, sekalipun di antara memiliki bias jadi memiliki keterkaitan nasabnya (Enjang & Dulwahab, 2018).

Menurut Stephen Littlejohn (Verderber & Verderber, 1998), setiap keluarga memiliki sejumlah aspek sistem yang biasanya meliputi kesalingtergantungan, hierarki, perubahan lingkungan, aturan-aturan operasi, tujuan, keseimbangan, dan perubahan. Beberapa aspek sistem keluarga tersebut bisa dijadikan ciri atau karakteristik sebuah keluarga, yaitu: Kesalingtergantungan, hierarki, perubahan lingkungan, aturan-aturan dalam keluarga, tujuan keluarga, keseimbangan, perubahan (Enjang & Dulwahab, 2018).

Selain beberapa karakteristik yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa karakteristik yang senantiasa ada di dalam sebuah keluarga, yakni:

1. Dalam keluarga ada hubungan batiniah antara orang tua dan anak, dan antara suami dan isteri.
2. Sebuah keluarga lahir karena ada kesengajaan dalam membentuk keluarga.
3. Ada ikatan emosional yang kuat dan saling mengikat di antara anggota keluarga.
4. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh setiap anggota keluarga.
5. Ada proses reproduksi di dalam keluarga dalam menjaga, melestarikan garis keturunan yang akan melanjutkan tujuan atau

cita-cita keluarga.

6. Ada tempat tinggal yang menampung seluruh anggota keluarga.
7. Ada pembagian tugas yang tidak tertulis tetapi mengikat.
8. Di dalam keluarga ada aturan-aturan yang tidak tertulis, tetapi mengikat dan memaksa setiap anggota keluarga harus mentaatinya.
9. Ada keluarga yang memiliki ciri budaya yang berbeda dan sangat kuat dengan warisan nenek moyangnya.

Khairudin (2000) juga menyampaikan beberapa karakteristik keluarga, yaitu:

1. Kebersamaan. Di antara bentuk-bentuk organisasi sosial yang lain, keluarga merupakan bentuk yang paling universal, yang dapat ditemukan dalam semua masyarakat.
2. Dasar emosional. Karakteristik ini didasarkan pada suatu dorongan yang mendasar, seperti perkawinan, menjadi ayah, dan perhatian orang tua.
3. Perkembangan. Keluargalah yang memengaruhi dan membentuk karakter individu melalui kebiasaan-kebiasaan organis maupun mental. Keluarga pula yang paling mengetahui bagaimana perkembangan anggota keluarganya.
4. Ukuran yang terbatas. Keluarga dibatasi oleh kondisi-kondisi biologis.
5. Tanggung jawab para anggota. Keluarga memiliki tuntutan yang lebih besar dan kontinue daripada asosiasi-asosiasi yang lainnya.
6. Aturan kemasyarakatan. Masyarakat diatur oleh peraturan yang sah dan mengikat. Peraturan-peraturan tersebut terkadang diadopsi dari peraturan keluarga.
7. Sifat kesetaraan. Pada dasarnya di dalam keluarga tidak ada hierarki atau jenjang antara satu dan lainnya. Semuanya sama sebagai manusia yang memiliki tugas dan fungsi di muka bumi.

Faktor sosial dan politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Ini termasuk: akses ke keluarga berencana dan layanan kesehatan lainnya; cakupan perlindungan sosial; penyelesaian

pendidikan pasca-sekolah dasar yang berkualitas bagi anak perempuan; meningkatkan tingkat melek huruf wanita dewasa; dan, meningkatkan pengaruh perempuan dalam struktur pemerintahan dan pengambilan keputusan politik. Banyak dari dimensi ini saling bergantung dan memperkuat. Hambatan budaya, termasuk praktik dan sikap diskriminatif, juga perlu diidentifikasi dan ditangani secara aktif.

1. Budaya dan tradisi: Di semua negara, harapan tentang atribut dan perilaku yang sesuai untuk wanita atau pria dibentuk oleh budaya, tradisi, dan sejarah. Pola umumnya adalah bahwa perempuan memiliki otonomi pribadi yang lebih sedikit, lebih sedikit sumber daya yang mereka miliki, dan pengaruh yang terbatas atas proses pengambilan keputusan yang membentuk masyarakat dan kehidupan mereka sendiri. Strategi donor dapat memperkuat kemampuan perempuan untuk merumuskan dan mengadvokasi visi mereka sendiri untuk masyarakat mereka - termasuk interpretasi dan perubahan norma budaya dan gender.
2. Pendidikan dan pelatihan: Mendidik anak perempuan adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk pemberdayaan perempuan. Pendidikan memberi perempuan pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri yang mereka butuhkan untuk mencari peluang ekonomi. Menghapus biaya sekolah dan memberikan insentif keuangan bagi anak perempuan untuk bersekolah telah terbukti efektif untuk meningkatkan angka partisipasi dan penyelesaian anak perempuan. Langkah-langkah utama termasuk membangun sekolah yang dekat dengan masyarakat terpencil, memastikan bahwa sekolah memiliki guru yang berkualitas - baik perempuan maupun laki-laki - dan fasilitas sanitasi yang memadai, dan bahwa mereka adalah tempat yang aman bagi anak perempuan. Pelatihan kejuruan yang dirancang dengan baik mengarah pada pekerjaan yang dibayar lebih baik, dan tidak memusatkan perempuan pada pekerjaan berupah rendah dan keterampilan rendah atau memperkuat pemisahan pekerjaan antara perempuan dan laki-laki.

3. Kesehatan reproduksi dan seksual: Meningkatkan kesehatan perempuan memperkuat pemberdayaan ekonomi mereka. Akses ke informasi dan layanan seksual dan reproduksi (termasuk informasi tentang penularan HIV) dan penurunan angka pernikahan dini, meningkatkan peluang perempuan untuk menyelesaikan pendidikan dan keluar dari kemiskinan. Akses ke layanan kesehatan dapat ditingkatkan dengan mengurangi biaya pengguna, menyediakan transportasi dan memperkuat akuntabilitas penyedia layanan. Donor juga dapat mendukung layanan ibu dan kebidanan dan membantu meningkatkan ketersediaan penolong persalinan yang terampil.
4. Berbagi perawatan: Menyeimbangkan tanggung jawab bersalin dan keluarga dengan pekerjaan adalah tantangan yang menakutkan. Perawatan yang tidak dibayar berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui angkatan kerja yang bugar, produktif dan mampu belajar dan kreativitas tetapi juga menguras pasar tenaga kerja (perempuan). Diperkirakan bahwa jika pekerjaan perawatan diberi nilai moneter, itu akan menjadi antara 10% dan 39% dari PDB. Ekonomi perawatan dan nilai ekonominya perlu menjadi elemen yang jauh lebih penting dalam perdebatan dalam komunitas pembangunan internasional.



## BAB III

### METODOLOGI KAJIAN

**K**ajian tentang strategi pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis keluarga ini menggunakan metode deskriptif. Penggunaan metode deskriptif didasarkan pada target dalam kajian ini, yaitu untuk mendeskripsikan temuan-temuan data (hasil FGD, studi dokumen, pustaka) dan pembahasan sampai hasil dari kajian tentang kondisi objektif pekerja perempuan, keterampilan perempuan, pendidikan perempuan, posisi dan kondisi perempuan di Jawa Barat dalam keluarga. Pembahasan kajian ini disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan deskripsi sehingga bisa dengan mudah memahaminya.

Sumber data kajian ini terbagi pada dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang bersumber dari informan, yaitu dinas-dinas tenaga kerja, UMKM, dan BPS di Jawa Barat. Karena mereka memiliki data yang detil dan akurat, juga melakukan beberapa kegiatan yang langsung bersentuhan dengan pemberdayaan ekonomi perempuan di Jawa Barat. Sementara data sekundernya, di dapat dari berbagai sumber informasi yang ada kaitannya dengan strategi pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis keluarga, seperti dari dokumen-dokumen yang dimiliki tiap-tiap dinas yang menjadi informan dalam kajian ini, dan sumber rujukan lainnya bisa buku, jurnal, dan surat kabar yang selama masih relevan dengan tema kajian.

Ada tiga teknik dalam pengumpulan data kajian ini, yaitu:

1. FGD (*Focussed Group Discussion*). FGD yang melibatkan instansi dan dinas-dinas yang memiliki data mengenai perempuan di Jawa Barat, seperti dinas koperasi, dinas tenaga kerja, BPS di Jawa Barat. Perwakilan dari setiap dinas ini diundang untuk memberikan data dan informasi berkaitan dengan kondisi objektif perempuan di Jawa Barat, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi perempuan. Program-program atau strategi-strategi apa saja yang sudah dilakukan, baik berhasil atau kendala dilapangan, di setiap instansi tersebut.
2. Studi pustaka. Pada teknik pengumpulan data yang kedua yaitu studi pustaka. Tim kajian melakukan pencarian data-data dari buku, jurnal, dan media massa yang untuk mencari konsep, teori, dan data-data yang relevan dengan kajian.
3. Studi dokumentasi. Pada teknik pengumpulan data yang ketiga tim melakukan pelacakan pada dokumen-dokumen (berupa catatan, foto, dan atau arsip) yang dimiliki dinas-dinas terkait, yang berhubungan dengan tema kajian pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis keluarga.

Adapun analisis data dalam kajian ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi data. Reduksi data merupakan tahap awal dalam kajian ini. Dalam tahap reduksi data dilakukan pemilihan data-data yang muncul selama pengumpulan data di lapangan. Kemudian data kualitatif disederhanakan dan diringkas. Selanjutnya dilakukan pengelompokkan data yang sesuai dengan tujuan kajian.
2. Penyajian data. Tahap selanjutnya dalam analisis data ialah penyajian data. Informasi atau data-data yang sudah terkumpul dan sudah dipilah atau dikelompokkan yang sesuai dengan tujuan kajian, maka data tersebut mulai dinarasikan atau dideskripsikan.
3. Verifikasi dan penarikan kesimpulan. Tahap terakhir ialah data yang sudah disajikan, kemudian diverifikasi agar data tersebut benar dan valid. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan sementara, dan merumuskan saran dan rekomendasi berdasarkan hasil kajian.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Kondisi Objektif Jawa Barat

Menurut Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2010 tentang RTRWP 2009-2029, wilayah daratan Jawa Barat seluas 3.709.528,44 hektar. Sebagian besar wilayah Jawa Barat berbatasan dengan laut yang luasnya sepanjang 12 mil dari garis pantai seluas 18.153 km<sup>2</sup>, terbentang dari wilayah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi.

Provinsi Jawa Barat memiliki 19 pulau kecil yang tersebar di Kabupaten Sukabumi sebanyak 5 pulau, Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 2 pulau, Kabupaten Indramayu sebanyak 3 pulau, Kabupaten Garut sebanyak 2 pulau, dan Kabupaten Ciamis sebanyak 7 pulau. Pulau-pulau kecil ini bisa menjadi tempat wisata domestik dan mancanegara yang bisa mendatangkan pendapatan daerah kabupaten di wilayah Jawa Barat, termasuk pendapatan untuk perempuan.

Daratan Jawa Barat dibedakan atas 3 wilayah. *Pertama*, wilayah dataran dengan ketinggian 0-10 m di atas permukaan laut (dpl) seluas 54,02 persen yang terletak di wilayah bagian utara. *Kedua*, wilayah lereng perbukitan antara 10-1.500 m dpl seluas 36,48 persen terletak di bagian tengah. *Ketiga*, wilayah pegunungan, dengan ketinggian lebih dari 1.500 m dpl seluas 9,5 persen, terletak di bagian wilayah Jawa

Barat bagian selatan. Jawa Barat yang terbagi pada tiga daratan ini menjadikan potensi yang kaya dan beragam. Kalau dikelola dengan baik, maka satu sama lain bisa saling membutuhkan dan memberikan keberbedaan yang unik.

Jawa Barat memiliki iklim tropis, dengan suhu rata-rata antara 17,4-30,7<sup>0</sup> C, dan kelembaban udara antara 73-84 persen. Suhu terendah tercatat 9<sup>0</sup> C, yaitu di Puncak Gunung Pangrango, dan suhu tertinggi tercatat 34<sup>0</sup> C di daerah pantai utara. Suhu yang berbeda ini membuat Jawa Barat memiliki iklim yang berbeda dan menjadi kekhasan tersendiri untuk Jawa Barat. Suhu yang berbeda ini pun bisa menjadikan wilayah Jawa Barat beragam jenis pertanian. Karena ada beberapa tanaman yang tidak cocok dan tidak dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan, sebaliknya ada tanaman yang cocoknya di daerah panas.

Jawa Barat memiliki 60 Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 32.074,4 KM<sup>2</sup> 3,502 buah sungai dan 5 wilayah sungai. Wilayah sungai yang menjadi kewenangan provinsi sebanyak 2 buah, yaitu wilayah Ciwulan-Cilaki, dan Cisadea-Cibareno. Sungai-sungai ini membantu petani dalam mengairi ladang dan sawah-sawahnya, sehingga membantu Jawa Barat sebagai provinsi dengan swasembada pangan. Sungai-sungai ini membantu keluarga dan perempuan yang berprofesi sebagai petani.

Jawa Barat juga memiliki 663 waduk, seluas sekitar 18.355,43 hektar. Potensi air permukaan baik bersumber dari sungai maupun waduk sekitar 7.016.450.489,55m<sup>3</sup>. Pada tahun 2011 jumlah perusahaan yang aktif memanfaatkan air permukaan menjadi 681 perusahaan dari 676 perusahaan pada tahun 2010, sehingga di Jawa Barat surplus air dan jarang daerah yang susah air bersih.

Penggunaan lahan di Jawa Barat terdiri dari kawasan lindung seluas 1.304.128,6 ha (Mahmud, 2020), dan kawasan budi daya seluas 2.405.989,30. Jawa Barat memiliki potensi bahan galian (mineral) yang tersebar di tujuh belas kabupaten, meliputi: bahan galian mineral logam (emas, timah hitam, besi dan mangan), mineral industri (barit,

batu apung, batu gamping, belerang, dentonit, bon clay, diatomea, dolomit, feldspar, fosfat, gypsum, gasper, kalsedon, kalsit, kaolin, lempung, marmer, obsidian, oker, oniks, pasir kuarsa, perlit, toseki, dan zeolit) dan bahan galian konstruksi (batu andesit, pasir, sirtu, dan tanah urug).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat tahun 2009-2029, Jawa Barat terbagi ke dalam 6 Wilayah Pengembangan (WP), yaitu:

1. Wilayah Pengembangan Bodebekpunjur, yang mencakup wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor dan sebagian Kabupaten Cianjur. Wilayah-wilayah ini memiliki potensi untuk dikembangkan dalam sektor pariwisata, industri manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan, agribisnis dan agrowisata;
2. Wilayah Pengembangan Purwasuka, yang meliputi daerah Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang. Wilayah ini memiliki potensi pengembangan pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata, dan pertambangan;
3. Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning, yang mencakup kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang. Wilayah ini merupakan wilayah yang potensial untuk dikembangkan dalam sektor agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan, dan pariwisata;
4. Wilayah Pengembangan Priangan Timur-Pangandaran, yang mencakup Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. Wilayah ini memiliki potensi pengembangan dalam sektor pertanian perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, dan pertambangan mineral;
5. Wilayah Pengembangan Sukabumi, wilayahnya mencakup

Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi dan sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur. Wilayah ini memiliki potensi untuk dikembangkan dalam sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, bisnis kelautan, dan pertambangan mineral;

6. Wilayah Pengembangan kawasan khusus Cekungan Bandung yang meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang. Wilayah ini memiliki potensi pengembangan pada sektor pertanian hortikultura, industri non polutif, industri kreatif, perdagangan dan jasa, pariwisata, dan perkebunan.

Keenam wilayah pengembangan di Jawa Barat ada yang beririsan antara satu kabupaten atau kota, sehingga dalam penggalan dan pengembangan potensinya bisa sinergi antar kabupaten atau kota. Bahkan ada satu program dan strategi pengembangan potensi daerah bisa diaplikasikan di beberapa daerah. Begitupun dengan perempuan yang sudah disiapkan potensi tiap daerah atau tempat tinggalnya. Tinggal bagaimana perempuan bisa mengakses dan memanfaatkan setiap potensi yang dimiliki kabupaten dan kota di wilayah Jawa Barat. Itulah potensi-potensi alam Jawa Barat, yang sekaligus bisa dijadikan modal dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Tinggal bagaimana menggunakan dan memanfaatkannya.

Tidak hanya potensi alam, di Jawa Barat juga tersimpan potensi lainnya yang dapat mempermudah dan membantu perempuan dalam melakukan pemberdayaan ekonomi. Misalnya saja seni dan budaya yang lahir dan berkembang di Jawa Barat.

Seni dan budaya di Jawa Barat mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya prestasi seni dan budaya di tingkat nasional dan internasional, seperti angklung, wayang golek, seni tari, dan batik. Tidak hanya itu, masih banyak seni-seni Jawa Barat yang sudah terkenal di mancanegara.

Mengenai budaya yang bisa dijadikan potensi, masyarakat Jawa Barat memiliki nilai-nilai luhur sebagai jati diri masyarakat Jawa Barat,

seperti solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaan terhadap budaya dan bahasa, berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, kebersamaan dan kemandirian. Orang-orang Jawa Barat, termasuk perempuan dikenal sebagai manusia yang ramah, sopan, dan santun sehingga membuat para pendatang betah untuk tinggal lama di Jawa Barat.

Di bidang olah raga pun Jawa Barat memiliki potensi yang bagus. Olah raga di Jawa Barat mengalami peningkatan dengan menduduki peringkat kedua pada PON tahun 2012. Sarana dan prasarana olah raga di Jawa Barat terus meningkat dan memenuhi harapan masyarakat untuk memenuhi olah raga, agar badan sehat sehingga bisa bekerja dengan baik.

Untuk memudahkan orang beraktivitas atau mengunjungi dari satu daerah ke daerah lain, maka akses di daerah Jawa Barat dapat ditunjukkan dengan keadaan infrastruktur transportasi. Jawa Barat memiliki jaringan jalan yang terbagi ke dalam: (1) Jalan nasional sepanjang 1.351,13 km; (2) jalan provinsi

Kemudahan akses jalan ini membantu dalam menunjang peredaran barang, akses pembangunan ke daerah-daerah terpencil sehingga perekonomian terbangun di daerah-daerah dan pembangunan Jawa Barat merata. Tingkat kemandapan jalan (kondisi baik dan sedang) di Provinsi Jawa Barat meningkat 0,51 persen, dari 97,05 persen pada tahun 2012 menjadi 97,56 persen pada tahun 2013.

Mobilitas pergerakan angkutan penumpang dan barang telah didukung oleh: (1) jaringan jalan kereta api sepanjang 1.135,442 km yang terdiri dari jaringan lintas raya sepanjang 931,666 km dan jaringan lintas cabang 203,775 km; (2) prasarana transportasi laut, meliputi satu pelabuhan utama, enam pelabuhan pengumpan regional, satu pelabuhan pengumpul, dan empat pelabuhan pengumpan lokal, tiga prasarana transportasi udara meliputi Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung, Bandara Nusawiru di Kabupaten Pangandaran dan Bandara Penggung atau Cakrabuana di Kota Cirebon.

Bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dapat dijelaskan mengenai fasilitas yang dimiliki untuk mendukung perekonomian adalah mengenai jumlah bank, restoran serta hotel. Jumlah bank di Jawa Barat mengalami peningkatan dari 414 unit pada tahun 2007 menjadi 613 unit pada tahun 2011. Jumlah hotel dan akomodasi pada tahun 2007 sebanyak 1.477 meningkat menjadi 1.584 pada tahun 2011.

Pada sektor energi dan sumber daya mineral, pengembangan energi ketenagalistrikan dilakukan melalui upaya peningkatan rasio elektrifikasi Jawa Barat. Pada tahun 2010 desa-desa yang belum terjangkau oleh jaringan listrik sudah dijangkau oleh jaringan listrik PLN. Pada Desember 2014 Rasio Elektrifikasi (RE) adalah 99,06 persen. Selain itu, untuk mendukung peningkatan elektrifikasi rumah tangga terus dikembangkan pemanfaatan energi baru terbarukan terutama potensi energi panas bumi, mikrohidro, biofuel, energi angin dan gelombang (dalam skala terbatas).

Potensi pada iklim investasi pun bagus di Jawa Barat. Penanaman modal yang diukur dari nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku pada kondisi awal RPJMD Tahun 2013 adalah 194,33 triliun, dan pada tahun 2014 menjadi 161,1 triliun. Berdasarkan data realisasi investasi PMDN menurut provinsi tahun 2013, nilai investasi PMDN di Jawa Barat sebesar 9006,10 miliar rupiah, atau 7,02 persen dari total nilai investasi di Indonesia yang mencapai 128.150,60 miliar rupiah.

Secara nasional, peringkat investasi Jawa Barat menduduki peringkat ke-4. Tingginya nilai investasi PMDN mencerminkan iklim investasi yang semakin membaik. Jika dilihat dari realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA), Jawa Barat menempati peringkat ke-1 secara nasional, dengan nilai investasi PMA Jawa Barat mencapai 7124,90 juta US Dollar atau setara dengan 24,89% dari total realisasi investasi PMA Indonesia.

Tujuan investor untuk wilayah Jawa Barat sebagian besar adalah di daerah Kabupaten Bekasi, Kota Bandung dan Kabupaten Cirebon



dengan investasi masing-masing sebesar 13,2 triliun, 9,5 triliun dan 7 triliun rupiah. Berdasarkan penyerapan tenaga kerjanya, investasi yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah di Kabupaten Bekasi sebanyak 87.029 orang, Kota Bandung 64,177 orang, dan Kota Depok 58.811 orang.

Berdasarkan jenis sektornya, pada tahun 2011 untuk PMDN tiga sektor utama yang menjadi tujuan investasi adalah sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar 2,1 triliun atau 29,4 persen, sektor industri lainnya sebesar 1,6 triliun atau 21,93 persen, dan sektor industri karet dan plastik sebesar 0,8 triliun rupiah atau 10,97 persen.

Sementara itu, tiga sektor utama PMA yang diminati investor adalah sektor industri logam, mesin dan elektronika dengan nilai sebesar 10,3 triliun atau 24,97 persen, sektor listrik, gas, dan air sebesar 7,1 triliun atau 17,28 persen, dan sektor perdagangan dan reparasi sebesar 6,4 triliun rupiah atau 15,59 persen.

Tidak hanya kuantitas yang banyak mengenai potensi yang dimiliki Jawa Barat, tetapi juga memiliki variasi potensi yang membantu perempuan dalam meningkatkan ekonomi untuk keluarga. Tinggal bagaimana perempuan mempersiapkan diri dengan semangat kerja yang tinggi, membekali diri dengan kompetensi yang tinggi, dan memilih potensi alam mana yang sesuai dengan keahlian diri.

#### **4.2. Kondisi Keluarga di Jawa Barat**

Penduduk Jawa Barat pada tahun 2015 diperkirakan sebanyak 46,71 juta jiwa, terdiri atas laki-laki sebanyak 23,68 juta jiwa dan perempuan sebanyak 23,03 juta. Jumlah penduduk tersebut menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

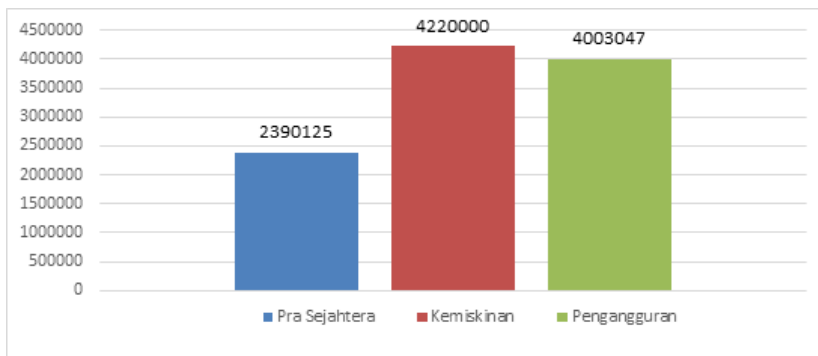
Namun jumlah penduduk yang besar itu memiliki masalah, berdasarkan data BKKP Provinsi Jawa Barat tahun 2015, bahwa dari 46,71 juta jiwa penduduk Jawa Barat masih terdapat keluarga yang tergolong prasejahtera, yaitu sebanyak 2.390.125 jiwa. Dan jumlah kemiskinan di Jawa Barat masih tergolong tinggi. Menurut data dari

Satu Data Pembangunan Jawa Barat, Pusdalisbang tahun 2016, jumlah kemiskinan di Jawa Barat mencapai 4,22 juta atau 8,95 persen dari seluruh penduduk Jawa Barat.

Mengenai keluarga prasejahtera, miskin dan keluarga yang masih menjadi pengangguran di Jawa Barat, bisa dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 4.1**

**Keluarga Pra Sejahtera, Kemiskinan dan Pengangguran**



Sumber: Pusdalisbang tahun 2016 dan BKKBN tahun 2015.

Kemudian pada tahun 2017, jumlah keluarga yang tergolong prasejahtera mengalami penurunan. Sebaliknya keluarga yang tergolong sejahtera mengalami peningkatan. Ini kondisi yang bagus dalam sebuah pembangunan daerah. Artinya ketika keluarga meningkat secara ekonomi, maka akan meningkatkan pula aspek-aspek lainnya. Sebagaimana dikatakan Khairudin (2000) bahwa keluarga merupakan unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat, yang merupakan landasan dari semua institusi.

Pada tabel berikut ini bisa dilihat bagaimana jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera tiap kabupaten dan kota di Jawa Barat:

**Tabel 4.1**  
**Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera Jawa Barat**

Kabupaten/Kota	Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera		Jumlah
		I	II	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Kabupaten/Regency</b>				
01. Bogor	102,233	628,062	586,875	1,317,170
02. Sukabumi	66,773	413,154	277,991	757,918
03. Cianjur	50,516	276,789	387,693	714,998
04. Bandung	58,609	518,409	344,388	921,406
05. Garut	47,446	466,218	242,100	755,764
06. Tasikmalaya	62,250	332,649	142,238	537,137
07. Ciamis	28,352	260,423	113,857	402,632
08. Kuningan	18,515	224,132	107,286	349,933
09. Cirebon	62,960	352,354	202,891	618,205
10. Majalengka	22,997	250,863	135,933	409,793
11. Sumedang	16,156	67,917	289,283	373,356
12. Indramayu	78,412	307,713	133,413	519,538
13. Subang	57,202	289,510	137,331	484,043
14. Purwakarta	21,132	159,839	90,219	271,190
15. Karawang	111,807	303,211	192,282	607,300
16. Bekasi	106,154	383,985	298,213	788,352
17. Bandung Barat	44,168	136,910	311,363	492,441
18. Pangandaran	12,504	75,443	41,102	129,049
<b>Kota/City</b>				
19. Bogor	15,547	30,562	179,141	225,250
20. Sukabumi	4,258	54,598	30,203	89,059
21. Bandung	34,795	339,000	164,018	537,813
22. Cirebon	7,285	13,718	62,262	83,265
23. Bekasi	42,951	224,120	142,813	409,884
24. Depok	19,174	125,251	174,836	319,261
25. Cimahi	6,800	89,439	49,456	145,695
26. Tasikmalaya	11,086	88,834	91,204	191,124
27. Banjar	4,255	29,190	29,148	62,593
<b>Jawa Barat</b>	<b>1,114,337</b>	<b>6,442,293</b>	<b>4,957,539</b>	<b>12,514,169</b>

Jumlah keluarga prasejahtera pada tahun 2017 sebesar 1.114.337. Jumlah ini mengalami penurunan kurang lebih satu juta, dari 2.390.125 tahun sebelum. Dan keluarga sejahtera satu terus meningkat menjadi 6.442.293, dan sejahtera 2 pun bertambah menjadi 4.957.539.

Sementara itu keluarga dan masyarakat yang berada pada garis kemiskinan di Jawa Barat masih tetap. Mengenai data garis kemiskinan di Jawa Barat, bisa dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Penduduk Miskin	
		(3)	(4)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>2015</b>			
Maret	324.992	4.224,33	8.95
September	332.119	4.168,11	8.77
<b>2016</b>			
Maret	344.427	4.168,44	8.71
September	354.866	3.774,41	7.83
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional			

Penduduk miskin di Jawa Barat antara tahun 2016-2017 jumlahnya ada penurunan, yaitu dari 8.77 persen menjadi 7,83 persen pada bulan September. Pemerintah Jawa Barat telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin yang telah menjadi masalah di setiap provinsi di Indonesia.

Keberhasilan pemerintah Jawa Barat dalam menurunkan angka kemiskinan, berakibat pada meningkatkannya kualitas keluarga. Dengan keluarga yang meningkat, maka akan terjadi perubahan-perubahan kearah yang lebih baik. Sebagaimana dikatakan Stephen Littlejohn (dalam Verderber & Verderber, 1998), bahwa setiap

keluarga memiliki sejumlah aspek sistem yang biasanya meliputi kesalingtergantungan, hierarki, perubahan lingkungan, tujuan, keseimbangan, dan perubahan. Keluarga bisa mengubah seseorang menjadi baik atau sebaliknya jelek.

Kemudian pada aspek tempat tinggal atau rumah. Menurut data yang dikeluarkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tahun 2014, bahwa keluarga di Jawa Barat yang tidak memiliki rumah yang layak huni berjumlah sekitar 10.632. Jumlah ini terbagi ke dalam beberapa jenis rumah yang tidak layak huni, seperti: (1) rumah yang tidak memiliki kamar mandi dan kakus, (2) rumah yang lantainya tanah, (3) rumah yang tidak memiliki listrik, (4) rumah yang sudah sangat tua dan hampir roboh, (5) rumah yang dekat dengan kali, (6) rumah yang di dalamnya tinggal beberapa anggota keluarga dan hidup berjejal, dan (7) rumah seperti gerobak yang berpindah-pindah, rumah di kolong jembatan, rumah dengan padat penduduk.

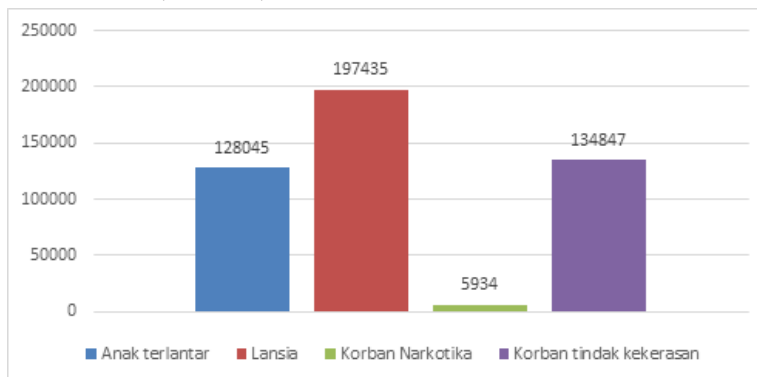
Pembagian dan klasifikasi rumah tidak layak huni cukup variatif. Keadaan ini disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu, sehingga banyak keluarga yang bertempat tinggal tidak layak huni. Kondisi tempat tinggal yang tidak layak ini memicu kesehatan yang buruk untuk anggota keluarga. Berbagai jenis penyakit bisa tumbuh dan menular ke anggota keluarga lainnya, mulai dari penyakit kulit, penyakit TB, dan jenis penyakit lainnya.

Kemudian ada beberapa masalah lain yang terjadi di dalam keluarga Jawa Barat, yaitu masalah anak terlantar karena orang tua bercerai, lansia yang terlantar karena kekurangan ekonomi atau tidak adanya kesadaran anak-anaknya untuk merawat orangtua yang sudah renta, korban narkoba karena anak-anak tidak memperhatikan di dalam keluarga, KDRT, dan kekerasan seksual pada anak di dalam keluarga dengan jumlah korban yang setiap tahun terus bertambah.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Jawa Barat pada tahun 2014, bahwa kasus anak terlantar, lansia terlantar, dan kekerasan yang terjadi di dalam keluarga Jawa Barat bisa dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 4.2

Anak Terlantar, Lansia, Korban Narkotika dan Tindak Kekerasan



Sumber: Dinas Sosial Jawa Barat, 2014.

Khusus untuk anak terlantar di Jawa Barat, disebabkan beberapa hal, yaitu *pertama*, lemahnya ekonomi keluarga. Keluarga yang tidak sanggup lagi membiayai kebutuhan anak-anaknya, mulai dari uang jajan yang tidak terpenuhi, makanan yang tidak terjamin, dan pendidikan yang tidak terpenuhi, sehingga anak-anak tersebut hidup terlantar di jalanan, trotoar, perempatan untuk mendapatkan apa yang tidak didapatkannya di dalam keluarganya. *Kedua*, perceraian yang dikarenakan konflik suami istri. Kasus perceraian di Jawa Barat ini angkanya cukup tinggi. Pada tahun 2013 sampai Mei 2014, angka perceraian terhitung tinggi, yaitu hampir mencapai 10 persen. Faktor yang memicu perceraian pun beragam, ada karena perselingkungan salah satu pasangannya, perekonomian yang kurang, dan masih labilnya pasangan pernikahan karena menikah di usia yang relatif masih muda, dan lain sebagainya.

Dampak dari orangtua yang bercerai adalah anak-anak yang menjadi korban. Anak-anak kurang perhatian dan pengawasan dari orang tuanya. Efek negatif lainnya ialah anak-anak terjerumus pada penggunaan obat-obatan terlarang sebagai bentuk kompensasi atas kondisi dan situasi di dalam rumah yang membuatnya tidak betah dan tidak siap menanggung beban hidupnya. Selain itu, muncul kenakalan

remaja yang membuat resah masyarakat.

Tidak heran kalau jumlah pengguna dan korban dari narkoba tiap tahunnya terus meningkat. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa sepanjang tahun 2014, jumlah pengguna narkoba Jawa Barat meningkat, sekitar 700.000 jiwa, dan mendominasi jumlah pengguna narkoba di Indonesia. Para pengguna narkoba di Jawa Barat cukup variatif, yaitu rentang usia 10- 59 tahun. Data BNN menyebutkan dari angka 34,7 juta jiwa penduduk Jawa Barat, maka prevalensi Jawa Barat ada di angka 2,45 persen. Dengan jumlah absolut pengguna narkoba di Jawa Barat 850 ribu jiwa (Humas, 2016).

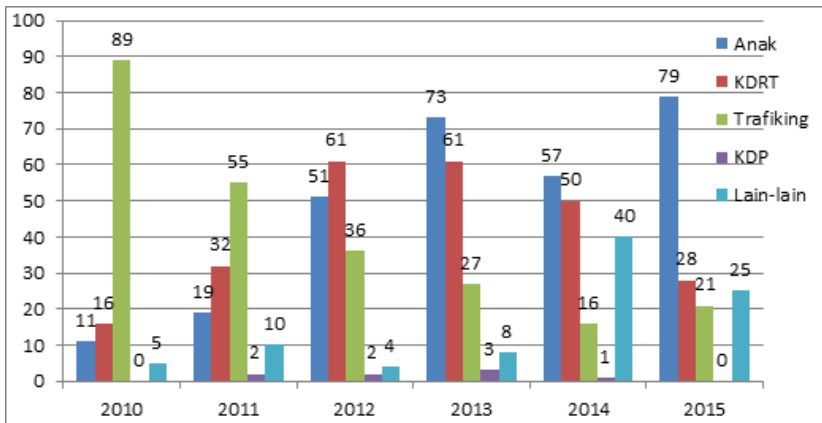
Di antara penanggulangan atau mengurangi jumlah pengguna narkoba di Jawa Barat ialah dengan mengoptimalkan peran keluarga. Karena keluarga memiliki peran dan fungsi sebagai tempat konseling atau terapi, tempat berbagi, pendidikan formal dan informal, dan *filter* budaya (Enjang & Dulwahab, 2018).

Masalah selanjutnya di dalam keluarga Jawa Barat ialah kekerasan terhadap anak dan perempuan yang lebih populer disebut dengan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan atau pelecehan seksual pada anak dan perempuan dengan jumlah korban setiap tahunnya terus meningkat.

Mengenai kedua jenis kekerasan yang terjadi di dalam keluarga Jawa Barat, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

#### **Grafik 4.3**

#### **Trafiking dan Kekerasan terhadap Anak**



Sumber: P2TP2A, September 2015

Berdasarkan data dari P2TP2A tahun 2015, bahwa posisi yang paling tinggi adalah kekerasan terhadap anak, termasuk pelecehan seksual terhadap anak, disusul dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang biasanya dilakukan suami terhadap isterinya, dan trafiking yang seringkali menimpa perempuan muda yang tidak memiliki keterampilan, pengetahuan dan wawasan, sehingga cukup rawan ditipu atau dimanfaatkan orang-orang yang berniat mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain.

Sesungguhnya KDRT tidak akan terjadi kalau di antara para anggota keluarga merasakan betul bagaimana sesungguhnya di dalam keluarga itu senantiasa lahir dan berkembang rasa kebersamaan, memiliki ikatan emosional yang kuat, ada batasan-batasan meskipun ada ikatan yang kuat, dan di dalam keluarga ada tanggungjawab para anggotanya untuk saling melindungi, dan ada aturan masyarakat yang diadopsinya (Khairuddin, 2000).

### 4.3. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Jawa Barat

Pemberdayaan perempuan di Indonesia sudah lama dibicarakan dan menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia. Pemberdayaan perempuan mulai formal dibahas pada tahun 1999, yaitu pada rapat kerja nasional dengan tema Pembangunan Peranan Perempuan yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Peranan Perempuan.



Pada waktu itu istilahnya masih pembangunan, belum pada pemberdayaan.

Kemudian pemberdayaan perempuan di Jawa Barat tidak jauh berbeda dengan pemberdayaan perempuan pemerintah yang menjadi pusat kebijakan. Di Pemerintah Jawa Barat, program pemberdayaan perempuan menginduk ke pemerintah pusat. Di Jawa Barat pemberdayaan perempuan pun sudah lama dilakukan oleh setiap dinas di provinsi ataupun di kabupaten dan kota. Dan tiap-tiap kabupaten dan kota di Jawa Barat, berbeda dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan. Ada yang menggunakan program yang dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, tetapi ada juga program yang dibuat sendiri sesuai dengan potensi daerah kabupaten dan kota.

Hasil dari pemberdayaan perempuan di setiap daerah kabupaten dan kota di wilayah Jawa Barat pun beragam. Ada yang berhasil, tetapi ada juga yang tidak berhasil. Seperti di Kota Bogor yang prioritas pemberdayaan perempuannya fokus pada perluasan wilayah yang dianggap kurang pemberdayaan perempuannya. Adapun program yang sudah dilaksanakan di Kota Bogor salah satunya ialah program P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera). Pelaksanaan P2WKSS di Kota Bogor ialah dengan menjalin sinergisitas lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama dalam melakukan pembinaan. Kemudian ada juga program DPMPPA, dimana untuk DPMPPA memberikan pelatihan tata boga, membuat, dan menjahit kepada perempuan di Kota Bogor.

Sementara Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kota Bogor bentuk kerjasamanya ialah dengan pembentukan RW siaga dan penyuluhan kesehatan serta PHBS, pembentukan kelas gizi dan ASI. Dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membantu dalam hal pembuatan akte kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga.

Atas hasil sinergitas lintas OPD ini, terutama di lokasi P2WKSS Pasir Jaya, bahwa progres saat ini kondisinya telah mencapai 95 persen. Ini terlihat di antaranya dengan meningkatnya kreatifitas masyarakat, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan.

Program lainnya yang ada di Kota Bogor ialah program teknologi tepat guna, posyantek yang inovatif, dan membuat sekolah perempuan yang memperkenalkan 19 modul dalam pembelajarannya. Salah satunya adalah bagaimana perempuan sebagai asset dapat berperan aktif agar keluarga dapat utuh. Namun dalam sekolah yang khusus untuk perempuan ini, belum menyentuh aspek *skill* perempuan.

Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Ciamis berbeda dengan pemberdayaan perempuan di Kota Bogor. Di Kabupaten Ciamis pemberdayaan perempuan lebih mengoptimalkan koperasi. Cukup banyak koperasi di Ciamis yang berbadan hukum, termasuk koperasi wanita dengan ibu-ibu PKK. Pengelolaan PKK di Ciamis cukup baik, dan perempuan yang aktif pun disiplin dan cukup terlatih.

Selain koperasi dan PKK di Kabupaten Ciamis pun ada program bank sampah yang semuanya dikelola oleh perempuan. Perempuan mengumpulkan gelas-gelas bekas aqua yang kemudian disetorkan dan dijual kepada bank sampah. Sampah-sampah dari gelas aqua ini, sebagai bahan kerajinan anyaman yang nantinya hasilnya dijual. Hasil dari kerajinan perempuan di Ciamis dengan bahan dari sampah ini, sudah bisa ditampilkan pada even-even lokal dan regional. Kendalanya adalah harga bahan yang mahal karena biaya produksi yang tinggi.

Khusus untuk bidang UMKM dan bidang industri di Kabupaten Ciamis, biasa mengadakan pelatihan-pelatihan pengemasan produk lokal, seperti cangkul, suling dan lain sebagainya. Kerajinan anyaman diharapkan bisa diolah hingga *finishing*. Ada lebih dari 4.000 pelaku usaha mikro. Ada juga program bantuan tunai, sudah menyediakan e-warung di beberapa kecamatan se-Kabupaten Ciamis.

Pemberdayaan perempuan berbeda kondisi dan situasinya dengan wilayah lain, di Kota Cirebon, dalam pemberdayaan perempuan, pemerintahnya melakukan pelatihan untuk masyarakat secara gratis, namun tanpa ditindak lanjuti dengan pendampingan atau pelatihan dalam bentuk *soft skill*, maka keberlangsungannya pun hanya berjalan singkat.

Di Kota Cirebon pun membuat kelompok-kelompok PEKKA baru dengan menggandeng Rumah Zakat. Misalnya mengubah

*mindset* masyarakat tentang sampah. Dari anggapan sampah harus dibuang menjadi sampah harus dikelola. Memberdayakan ekonomi masyarakat dari awalnya penerima zakat menjadi pemberi zakat. Pelatihan *soft skill* dengan menggandeng Perguruan Tinggi Fakultas Psikologi, dengan tujuan untuk merangsang para pemuda agar kerja keras dalam berusaha. Selain itu, pemerintah di Kota Cirebon pun senantiasa menggandeng dunia otomatis, dalam pelatihan dan informasi-informasi peluang pekerjaan.

Kesulitan yang seringkali dihadapi para pengelola dalam pemberdayaan ini ialah, rekrutmen peserta yang susah. Karena peserta sudah *transport minded* artinya peserta sudah memahami akan kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan yang selalu diberi uang transportasi ketika kegiatan selesai. Jadi ketika mengetahui tidak ada transportasinya, peserta relatif tidak ikut kegiatan. Jadi ikut kegiatan hanya demi mendapat uang transportasi, bukan mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru yang bermanfaat demi hidup dan masa depannya.

Kondisi pemberdayaan perempuan di Majalengka cukup berbeda juga, di mana banyak perempuan di Majalengka menjadi tulang punggung keluarga. Ini harus ada perubahan *mindset*, perempuan harus mampu menjadi *figure* atau pemimpin dalam keluarga.

Kendala lainnya ialah di Majalengka ketersediaan bahan baku susah didapatkan. Kemudian setelah produk itu selesai diproduksi, namun produk yang dihasilkan kurang mendapat apresiasi pasar atau diterima oleh pasar, sehingga banyak produk karya perempuan tidak laku dan numpuk. Selain itu kendala *packaging* yang kurang menarik, dan tidak *eye catching*.

Kendala lainnya ialah dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Majalengka karena minimnya pendampingan sehingga tingkat keberhasilan pun menjadi minim. *Monitoring* dan evaluasi kurang, sehingga dana yang diberikan seringkali habis dan tidak jelas. Padahal ada peluang lain yang sekarang di Majalengka, yaitu pariwisata yang bisa menjadi lokomotif usaha baru dan alternatif di Majalengka.

Kendala lainnya di Majalengka adalah tingkat perceraian yang tinggi. Dikarenakan pertumbuhan industri di Kabupaten Majalengka berbanding lurus dengan peningkatan angka perceraian dengan kasus cerai gugat. Tahun 2016 angka perceraian capai 4.535 perkara, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 4.385 kasus. Kasus perceraian selalu didominasi oleh gugat cerai yang prosentasenya mencapai 65 persen, sisanya sebesar 35 persen talak (Purnawati, 2017).

Strategi alternatif yang pernah dilakukan di Majalengka adalah dengan mendirikan kelompok-kelompok yang kemudian menjadi koperasi. Atau dengan kemitraan. Promosi produk dan potensi Majalengka terus ditingkatkan dan menjadi hal yang penting. Mengadakan even-even atau pameran multietnik. Diharapkan ada kerjasama dengan ibu-ibu PKK di masing-masing desa, dan menargetkan *one village one product*.

Kemudian di Kabupaten Sumedang, beberapa dinas sudah mengadakan kegiatan yang sesuai dengan kondisi di daerah lain. Namun masalahnya adalah ketiadaan kegiatan yang sifatnya terus-menerus, dan masih sedikit kegiatan yang berpihak pada perempuan. Kalau pun ada, kegiatan-kegiatan tersebut harus kembali kepada keluarga, yaitu peran perempuan dalam mendidik dan menjaga keutuhan keluarga.

Salah satu prinsip yang dikembangkan di Kabupaten Sumedang ialah perempuan juara diawali dengan penguatan lahir dan batin. Perempuan tidak boleh melupakan kegiatan yang mendasar, yaitu meningkatkan kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional. Inilah yang sesungguhnya menjadi target dalam pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sumedang, yaitu perempuan juara yang religius.

Selain itu, di Sumedang juga mengembangkan program P2WKSS. Program ini diaplikasikan di Kecamatan Paseh Desa Bongkok, dan telah mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera, serta telah meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, melalui peningkatan kedudukan, peran kemampuan kemandirian serta ketahanan mental dan spiritual perempuan.

Di Sumedang juga ada kontes Mangga Gedung Gincu sebagai salah

satu upaya mengembangkan potensi daerah. Sudah ada 19 kelompok tani, yang juga melibatkan perempuan, se-Kabupaten Sumedang di area wisata Gendeng Desa Karyamukti Kecamatan Tomo. Mangga Gedong Gincu, cukup dikenal di masyarakat Kabupaten Sumedang. Buah ini, merupakan salah satu potensi yang cukup potensial.

Sementara di Tasikmalaya, pemerintah daerahnya telah mencanangkan program penciptaan 5.000 wirausaha baru. Setiap tahun 1.000 wirausaha baru. Sebelum pelatihan *skill*, diberikan dulu pelatihan motivasi bagi kaum perempuan. Program lainnya dalam mencapai wirausaha baru itu ialah Gema Madani, yaitu gerakan masyarakat berdaya saing.

Dalam pelaksanaannya, tidak selamanya lancar dan berjalan sesuai dengan rencana, tetapi ada kendala. Kendalanya adalah pada modal dan pemasaran. Di antara produk di Tasikmalaya adalah manisan honje, dan kendalanya adalah susahnya pemasaran yang lebih luas.

Pemberdayaan perempuan Cimahi lebih mengoptimalkan pada Sumber Daya Manusia. Difokuskan pada pengembangan produk lokal. Ada 4 kluster makanan dan kuliner, craft, tekstil, dan animasi - telematika. Di antara program yang sudah dilakukan dalam pemberdayaan perempuan ialah mengadakan inkubasi dan akselerasi. Inkubasi bagi wirausahawan baru. Dan akselerasi bagi wirausahawan yang sudah lama berjalan agar omzetnya bisa naik dan merekrut lapangan kerja baru.

Pelatihan di Cimahi berdasarkan aspirasi dari para pelaku UKM. Dilakukan penyebaran kuisisioner. Cimahi sudah memiliki Techno Park sebagai kawasan pengembangan ekonomi kreatif (klinik bisnis, pembayaran pajak dan lain-lain). Dalam pelaksanaannya, di Cimahi bekerjasama dengan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media.

Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bandung Barat dilakukan oleh Dinas Sosial dengan terus melaksanakan bantuan Kelompok USAHA BERSAMA (Kube). Pada tahun 2018, ada 69 KUBE

yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, provinsi, ataupun pusat.

Bantuan Kube dari APBD Kabupaten Bandung Barat digulirkan untuk 12 kelompok program Gempungan, 15 kelompok wanita rawan sosial ekonomi, 1 kelompok program Peningkatan Peran Wanita Keluarga Sehat Sejahtera, serta 1 kelompok program BSMS.

Khusus untuk bantuan Kube dari APBD Kabupaten Bandung Barat, tidak diberikan dalam bentuk uang. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk kambing ternak, serta berbagai barang untuk usaha warungan. Setiap Kube beranggotakan 5-10 orang. Sementara itu, bantuan Kube dari pemerintah provinsi dan pusat diberikan dalam bentuk uang.

Kelompok Usaha Bersama (Kube) sebagai salah satu program unggulan Kementerian Sosial dalam menanggulangi kemiskinan perlu diperkuat secara substansial maupun prosedural. Dimulai dari kejelasan aspek kelembagaan di pusat hingga daerah, penentuan jenis usaha kelompok, hingga penguatan fungsi dan peran pendamping program.

Penguatan SDM pendamping menjadi salah satu kunci keberlangsungan Kube apapun jenis usaha dan latar belakang pembentukannya. Permasalahan ditemukan menjadi hambatan keberlangsungan Kube, dimana salah satu yang paling menentukan adalah kurangnya pendampingan. Perlunya pemilihan pendamping yang berkualitas, memiliki semangat tinggi, pengetahuan memadai tentang pengembangan usaha dan mampu membangun jaringan ke sumber-sumber daya lokal. Hal ini terkait erat pula dengan pemilihan jenis usaha dan strategi pengembangannya, termasuk di dalamnya kapasitas individu anggota Kube dalam mengelola usaha.

Hampir sama juga pemberdayaan di Kota Sukabumi yang melaksanakan P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera) RW 1 Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole dan sudah dimonitoring dan dievaluasi oleh Tim Verifikasi P2WKSS Provinsi Jawa Barat tahun 2018.

Pelaksanaan dan pembinaan P2WKSS di Kota Sukabumi, senantiasa dilakukan secara optimal dan sinergi dengan seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Selain senantiasa dilakukan pembinaan kepada 100 KK (Kepala Keluarga) binaan, juga dilaksanakan perbaikan jalan lingkungan, rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), perbaikan MCK dan sarana air bersih. Di samping itu juga dilakukan pengembangan dan peningkatan keterampilan, melalui pelatihan kepada para WARSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi), P2WIK (Peningkatan Peranan Wanita Industri Kecil) dan Pekka (Perempuan Kepala Keluarga).

Berikutnya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karawang, yang juga mengimplementasikan P2WKSS dan kampung KB. Setiap tahun ada penetapan kampung P2WKSS. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Karawang bersinergi dengan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) Provinsi Jawa Barat.

Penduduk Jawa Barat tahun 2017 sebanyak 48,04 juta jiwa, dan tetap Jawa Barat sebagai provinsi terbesar jumlah penduduknya di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas laki-laki sebanyak 24,34 juta jiwa, dan perempuan sebanyak 23,70 juta jiwa, sehingga angka sex ratio di Jawa Barat sebesar 102,67, yang artinya terdapat 102-103 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan.

Di antara kabupaten dan kota di Jawa Barat, Kabupaten Indramayu yang memiliki sex ratio tertinggi, yaitu 106,18. Sedangkan sex ratio terendah ialah Kota Banjar, yaitu 97,63. Sebagian besar Kabupaten/Kota memiliki angka sex ratio lebih dari 100, yang artinya jumlah penduduk laki-laki masih lebih mendominasi, kecuali di enam kabupaten yang memiliki sex ratio kurang dari 100, yaitu Kabupaten Ciamis, Pangandaran, Tasikmalaya, Majalengka, Sumedang, dan Kota Banjar.

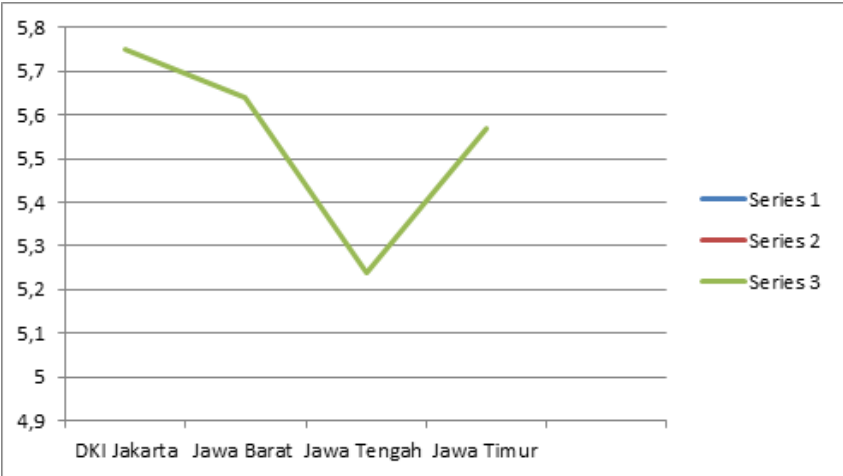
Penduduk terbesar jumlahnya berada di Kabupaten Bogor, yaitu sebanyak 5,71 juta jiwa, diikuti Kabupaten Bandung dan Kabupaten

Bekasi, masing-masing 3,66 juta dan 3,50 juta jiwa. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan populasi terkecil adalah Kota Banjar yang memiliki 182,39 ribu penduduk.

Provinsi Jawa Barat sangat bervariasi jika dilihat dari tempat tinggal penduduknya, yaitu perkotaan dan pedesaan. Hampir 72,5 persen penduduk Jawa Barat tinggal di daerah perkotaan, hal ini sebagai akibat dari masuknya industri yang mendorong terjadinya urbanisasi. Daerah penyangga Ibukota seperti Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Bekasi dan Kota Bekasi yang terbagi kedalam 5 wilayah administrasi Kabupaten/Kota menyumbang hampir sepertiga dari total penduduk Jawa Barat atau 31,64 persen populasi (Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2018).

Mengenai pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dari DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur, bisa dilihat pada grafik berikut ini:

**Grafik 4.4**  
**Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa**



Sumber: BPS, *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*, Edisi 79, Desember (2016: 22).

Mengenai pertumbuhan ekonomi di antara provinsi di Pulau Jawa,



DKI Jakarta masih paling tinggi pertumbuhannya, dengan rata-rata 5,75, yang kemudian disusul Jawa Barat 5,64, dan urutan ketiga Jawa Timur 5,57 dan Jawa Tengah 5,24. Ini artinya Provinsi Jawa Barat memiliki potensi untuk terus berkembang perekonomiannya, untuk terus mengejar pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta.

Kalau melihat pada jumlah angkatan kerja Jawa Barat tahun 2017 sebanyak 22,39 juta orang, dimana 20,53 juta orang di antaranya bekerja di berbagai sektor usaha, sedangkan sisanya 1,84 juta masih menganggur. Jumlah tersebut menjadikan angka tingkat pengangguran terbuka menjadi 8,22 persen. Penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 32,67 juta orang, dan usia nonproduktif sebanyak 15,36 juta menjadikan angka *dependency ratio* atau rasio ketergantungan menjadi 47,02, yang artinya dalam 100 orang usia produktif menanggung 47 orang usia nonproduktif (Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2018).

Namun jumlah angkatan kerja ini masih merata antara laki-laki dengan perempuan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa ketenagakerjaan di Jawa Barat, hasilnya menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih ada kesenjangan antara tenaga kerja laki-laki dengan tenaga kerja perempuan. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih di bawah laki-laki.

Pada Agustus 2017, TPAK laki-laki sebesar 82,40 persen, sementara TPAK perempuan hanya sebesar 43,89 persen. Dibanding kondisi setahun yang lalu, tahun 2016, TPAK laki-laki maupun perempuan dua-duanya mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 1,78 persen laki-laki dan 3,59 persen perempuan.

Perempuan Jawa Barat bekerja pada bidang pekerjaan yang cukup variatif. Untuk perempuan Jawa Barat yang bekerja di bidang pemerintahan sebagai pegawai negeri sipil pada tahun 2017 jumlahnya hampir sama dengan laki-laki, yaitu laki-laki 167,144 dan perempuan 164,183. Mengenai jenjang kualifikasi pendidikan perempuan yang bekerja sebagai PNS di lingkungan Jawa Barat, termasuk perbandingannya dengan laki-laki bisa dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi 2017**

Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekolah Dasar	3,264	74	3,338
SLTP	3,264	279	5,332
SLTP Kejuruan	175	14	189
SLTA	39,056	16,631	55,687
SLTA Kejuruan	3,342	2,043	5,385
SLTA Keguruan	29	3	32
Diploma I	644	1.444	2,088
Diploma II	18,462	28,687	47,149
Diploma III/Sarjana Muda	8,421	17,007	25,428
Diploma IV	829	1,877	2,706
S-1/Sarjana	76,829	89,484	166,313
S-2	10,901	6,591	17,492
S-3	139	49	188
<b>Jumlah/Total</b>	<b>167,144</b>	<b>164,183</b>	<b>331,327</b>

Sumber: BKN Wilayah III Jawa Barat

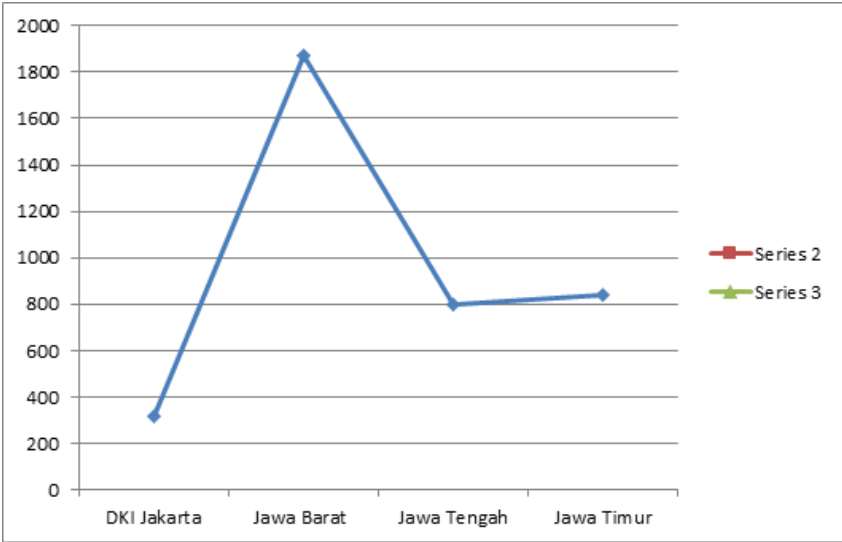
Ada data yang menarik mengenai perempuan yang bekerja sebagai PNS dengan tingkat pendidikan diploma II, laki-laki 18,462

dan perempuan 28,687, dan untuk PNS yang pendidikan terakhirnya sarjana yang jumlahnya lebih banyak dari laki-laki, yaitu laki-laki 76,829 dan perempuan 89,484. Ini berarti SDM perempuan, terutama pendidikan kaum perempuan tiap tahunnya terus meningkat. Tentu saja ini sebagai modal dalam dunia kerja, dan perempuan berpeluang besar dalam mendapatkan pekerjaan yang layak.

Khusus mengenai pengangguran di Jawa Barat, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat pengangguran yang paling tinggi. DKI Jakarta yang merupakan provinsi terpadat jumlah penduduknya, namun jumlah penganggurannya relatif lebih rendah dibandingkan Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti yang digambarkan dalam grafik berikut:

Gambar 4.1.

Jumlah Pengangguran di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur



Sumber: BPS, *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*, Edisi 79, Desember 2016, hal. 44.

Banyak faktor yang membuat masih tingginya pengangguran di Jawa Barat, mulai dari tingkat pendidikan yang rendah dan tidak

memiliki keahlian atau keterampilan hanya mengandalkan otot, sementara lapangan pekerjaan semakin sempit dan sulit didapatkan. Karena lapangan pekerjaan sudah diisi oleh masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dengan keterampilan di atas rata-rata dan keterampilan sebagaimana dibutuhkan oleh dunia kerja.

Selain itu, lemahnya mental *enterpreneur* menjadi pemasok tingginya tingkat pengangguran, karena dunia usaha sangat membutuhkan mental dan semangat bekerja yang tinggi, sehingga karena rendahnya pendidikan dan lemahnya metal menjadikan sebagian masyarakat Jawa Barat mudah prustasi dan tidak siap bersaing, sehingga kalah bersaing dengan anggota masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja, dan sikap mental siap bersaing.

Untuk perempuan yang bekerja, jumlahnya lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk bekerja dibanding laki-laki. Perempuan ketika bekerja menghabiskan waktu sebentar dibanding laki-laki. Baik yang bekerja 1 jam sampai 35 jam lebih. Artinya perempuan yang bekerja hanya sedikit waktu yang dihabiskan untuk bekerja. Sisanya mereka lebih memprioritaskan keluarga dan bekerja di rumah yang tidak berbayar.

Jumlah Jam Kerja	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-1	232,784	94,216	327,000
1-14	365,376	644,585	1,009,961
15-34	1,785,253	1,642,840	3,428,093
35+	11,148,393	4,638,128	15,786,521
<b>Jumlah</b>	<b>13,531,806</b>	<b>7,019,769</b>	<b>20,551,575</b>

Jumlah Jam Kerja	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-1	232,784	94,216	327,000
1-14	365,376	644,585	1,009,961
15-34	1,785,253	1,642,840	3,428,093
35+	11,148,393	4,638,128	15,786,521
<b>Jumlah</b>	<b>13,531,806</b>	<b>7,019,769</b>	<b>20,551,575</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2018

Mengenai jumlah jam kerja perempuan yang masih dibawah laki-laki, ini menandakan bahwa perempuan di Jawa Barat masih menghargai akan posisi dan perannya sebagai perempuan. Karena pada prinsipnya, pemberdayaan perempuan menurut Moser (1989). tujuannya ialah tetap mengingatkan akan kodrat perempuan yang harus menghargai dan menghormati laki-laki. Pemberdayaan perempuan bukan sebagai upaya mengalihkan posisi dan peran perempuan dari peran dan posisi laki-laki. Tetapi bagaimana mengangkat dan meninggikan derajat perempuan. Kalau terjadi *over lap* dan salah dalam praktik pemberdayaan perempuan yang lebih tinggi dari laki-laki, ini sama saja pemberdayaan perempuan yang salah atau disorientasi.

Lebih jauh Moser mengatakan bahwa inti dari strategi pemberdayaan perempuan, ialah pentingnya meningkatkan kekuasaan perempuan, bukan sekedar dalam kerangka dominasi terhadap laki-laki, melainkan dalam kerangka perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal diri perempuan di dalam keluarga.

Kemudian mengenai jenis usaha dan wirausaha yang dilakukan perempuan bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.5**  
**Jenis Usaha Laki-Laki dan Perempuan Di Jawa Barat**

<b>Jenis Kelamin</b>		
	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
	(2)	(3)
Berusaha sendiri	2,626, 096	1,426,908
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar	1,323, 804	697,836
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh Dibayar	590, 039	139,029
Buruh/Karyawan/Pegawai	6, 504, 074	3,088,332
Pekerja Bebas di Pertanian	787, 023	374,908
Pekerja Bebas di Non Pertanian	1, 344, 057	181,621
Pekerja Tak Dibayar	356,713	1,111,135
<b>Jumlah</b>	<b>13, 531, 806</b>	<b>7,019,769</b>
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2018		

Berdasarkan pada data dari BPS 2018 mengenai jenis pekerjaan perempuan cukup beragam. di antara beberapa jenis pekerjaan yaitu perempuan yang berusaha sendiri sebagai wirausaha sebesar 1,426,908. Perempuan yang menjadi buruh tidak tetap sebanyak 697,836. Perempuan yang menjadi buruh tetap sebanyak 139,029. Perempuan yang menjadi karyawan atau pegawai sebanyak 3,088,332. Perempuan yang menjadi pekerja bebas di pertanian sebanyak 374,332. Perempuan yang bekerja bebas di non pertanian sebanyak 181, 621. Perempuan yang bekerja tidak dibayar sebanyak 1,111,135.

Meskipun jumlah setiap jenis pekerjaan masih kalah jumlahnya dibanding dengan pekerja laki-laki, tetapi setiap jenis pekerjaan perempuan ikut berpartisipasi dan ikut andil dengan laki-laki. Tidak terlalu didominasi oleh laki-laki. Terutama jenis pekerjaan sebagai pegawai jumlahnya yang relatif tinggi. Ini menandakan bahwa perempuan terampil, memiliki kemampuan, dan mampu bersaing dengan laki-laki semakin meningkat, yaitu 3,088,332. Jumlah ini setengah dari pekerja laki-laki yang bekerja di bidang pegawai sebanyak 6,504,074.

Meskipun jumlah dan jenis pekerjaan yang masih sedikit dan kalah bersaing dengan laki-laki, perempuan Jawa Barat yang bekerja telah membantu meningkatkan perekonomian Jawa Barat. Menurut BPS bahwa perekonomian Jawa Barat digerakkan setidaknya oleh 20,55 juta orang pekerja (laki-laki dan perempuan). Mereka bekerja di berbagai lapangan usaha, di antaranya 28,64 persen di sektor perdagangan, sektor keuangan sebesar 12,92 persen, dan sektor jasa 10,91 persen. Meskipun pekerja (laki-laki dan perempuan) di Jawa Barat didominasi oleh lulusan SD, yakni mencapai 30,17 persen, dan pekerja lulusan SMA ke atas mencapai 40,87 persen (Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2018).

#### **4.4. Pembahasan**

Berdasarkan hasil kajian, baik pada sumber-sumber primer (FGD dan wawancara) maupun sekunder (studi dokumentasi), mengenai kondisi keluarga di Jawa Barat dan strategi pemberdayaan ekonomi perempuan yang sudah dilakukan di kabupaten dan kota di Jawa Barat, maka dapatlah dirumuskan strategi pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis keluarga.

Lebih jelas dan mudahnya dalam strategi pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis keluarga, bisa dilihat pada bagan di bawah ini:

**Gambar 4.2.**  
**Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Berbasis Keluarga dengan**  
**Memanfaatkan SDAS Lokal**



*Pertama*, pembentukan kelompok perempuan produktif. Tahap pertama dibentuk kelompok perempuan yang sekiranya bisa bekerjasama dengan baik, dan produktif nanti dikelompoknya. Pembentukan kelompok perempuan produktif ini mulai dari tiap RT di setiap desa.

Sebagaimana disarankan Widaningroem dan kawan-kawan (1999), bahwa strategi pemberdayaan perempuan ialah dengan membentuk kelompok usaha. ada banyak manfaat ketika pembentukan kelompok usaha perempuan yang produktif ini, yaitu bisa meminimalkan persaingan di antara perempuan, dan memperkuat modal dalam kelompok usaha perempuan. Selain itu, dengan adanya kelompok usaha perempuan ini, akan menguntungkan perempuan sendiri, karena perempuan memiliki kemampuan kerja yang tinggi, semangat dan keuletan bekerja cukup kuat.

Kelompok usaha perempuan yang produktif ini juga bisa membantu perempuan dalam berbagai kesulitan, dan berbagi informasi. Muniati dkk (2001) mengatakan bahwa kelompok organisasi (perempuan) tidak hanya sebagai paguyuban, tetapi juga sebagai sumber informasi, saling mendukung, dan sumber untuk bekerjasama atau usaha secara kolektif.

Sementara Gunawan Sumodiningrat (dalam Nugroho, 2008) bahwa dengan adanya kelompok perempuan ini berarti ada upaya pemihakan, yaitu perempuan sebagai pihak yang diberdayakan daripada laki-laki. Sekaligus kelompok perempuan ini sebagai strategi penyiapan, yaitu penyiapan pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, dan mengontrol sebuah kegiatan ekonomi perempuan.

*Kedua*, identifikasi sustainable SDAS lokal. Setelah kelompok



perempuan terbentuk langkah berikutnya ialah mengidentifikasi Sumber Daya Alam dan Sosial sebagai potensi dan modal yang akan diolah atau dikembangkan oleh kelompok perempuan tadi. Identifikasi SDAS ini tidak hanya sekali, tetapi dibutuhkan beberapa kali, agar bisa mengeksplorasi berbagai potensi yang bisa dikembangkan. Dan identifikasi SDAS bertujuan untuk mendekatkan perempuan dengan SDAS juga mempromosikan kekhasan daerahnya masing-masing. Selain semakin faham dengan potensi daerahnya, juga semakin bangga akan kekayaan alam daerah tempat tinggalnya.

*Ketiga*, menentukan alternatif pengembangan. Langkah ketiga ini mulai memikirkan alternatif-alternatif pengembangan dari setiap potensi atau SDAS yang berhasil diidentifikasi. Melakukan ATM (Amati Tiru dan Modifikasi) atau *benchmark* ke setiap pengembangan-pengembangan potensi daerah yang sudah dilakukan lembaga atau daerah lain, sehingga bisa menemukan strategi alternatif dalam pengolahan dan pengembangan potensi atau SDAS.

*Keempat*, pelatihan SDM. Langkah keempat ini merupakan langkah yang fokus pada peningkatan skill dan kompetensi SDM yang disesuaikan dengan potensi alam sekitarnya. Jangan memberikan pelatihan yang tidak sesuai dengan potensi alamnya, maka hasilnya atau outputnya tenaga terlatih tidak bisa dipakai karena berbeda antara *skill* dan potensi alamnya. Oleh karena itu, disesuaikan pelatihan-pelatihan yang kontinyu dengan melibatkan berbagai sektor yang sesuai dengan target dan tujuan dari setiap pelatihan.

Dalam pelatihan ini tidak hanya melibatkan pakar tetapi juga praktisi sehingga pelatihannya tidak hanya teori dan konsep, tetapi juga banyak melakukan simulasi dan praktik-praktik sehingga bisa lebih terasa hasil, dan mengetahui batas-batas kemampuannya. Termasuk dalam pelatihan ini juga diberikan pelatihan motivasi dan semangat bekerja untuk perempuan ketika menjadi pengusaha. Tujuannya adalah agar tidak mudah menyerah dan kreatif dalam menciptakan usaha.

IMF menekankan bahwa pentingnya perempuan diberikan pelatihan dalam meningkatkan ekonominya (Herri, 2009), bahwa

penting membantu dan mendorong kaum perempuan untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan, serta kompetensi diri mereka melalui berbagai program pelatihan. Adapun materi-materi pelatihan yang penting diberikan kepada perempuan ialah mengenai strategi usaha dan pemasaran produk, regulasi dan peraturan pemerintah terkait dengan legalitas dunia usaha, dan pelatihan bagaimana menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal, dan memperkenalkan berbagai forum pelatihan usaha dan jaringan usaha mikro perempuan.

Kalau menurut bahasa Hikmat (2004) pelatihan ini sebagai proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi perempuan agar mempunyai kemampuan sehingga perempuan bisa berdaya guna dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

*Kelima*, manajemen produksi dan pemasaran. Setelah perempuan dibekali dengan keahlian, maka langkah selanjutnya ialah memulai terjun ke lapangan untuk memproduksi barang atau produk. Ada standar yang harus dipahami perempuan ketika membuat sebuah produk, yaitu produk yang dihasilkan harus memiliki standar yang berkualitas tinggi, sehingga ketika dipasarkan tidak jauh berbeda atau bahkan lebih bagus dari produk orang lain. Di antara kendala pemasaran ialah karena produk yang dibuat kualitasnya di bawah orang lain. Jadi perempuan juga harus mahir dan menguasai dalam urusan manajemen produksi dan pemasaran, sehingga produknya tidak yang pertama dan terakhir.

*Keenam*, pendampingan. Setiap kegiatan atau usaha yang baru biasanya tidak langsung berjalan dengan baik, tetapi seringkali terkendala dengan berbagai hal sehingga membuatnya gulung tikar dan bubar. Bahkan sebelum produksi dan pemasaran, kendala-kendala di awal, misalnya, dalam pembentukan kelompok perempuan produktif, senantiasa terjadi hambatan dan rintangan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendamping yang intensif dan berasal dari daerah tersebut. Pendamping ini tidak hanya mendampingi dari proses pembentukan kelompok perempuan sampai tingkat manajemen produksi dan pemasaran, tetapi juga mengawasi, menjadi tempat

untuk berkonsultasi para perempuan, dan mengevaluasi setiap kegiatan kelompok perempuan.

Selanjutnya selain langkah-langkah pemberdayaan di atas, dalam mensukseskan dan melancarkan strategi tersebut, perlu juga dibuatkan struktur dalam pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis keluarga yang memanfaatkan SDAS lokal, seperti yang bisa dilihat pada struktur di bawah ini:

**Gambar 4.3.**

**Struktur Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Berbasis Keluarga dengan Memanfaatkan SDAS Lokal**



Struktur pemberdayaan ekonomi perempuan berawal dari arus bawah yang membentuk kelompok usaha perempuan. Ketika kelompok usaha perempuan ini sudah terbentuk dengan inisiatif dan dibantu pendamping, melakukan koordinasi dengan tingkat desa dan kecamatan, kemudian koordinasi dengan pihak dinas-dinas terkait untuk menselaraskan program. Dan agar program-program ini berjalan lancar tanpa ada hambatan, perlu dibuatkan payung hukum dengan kebijakan-kebijakan dari pusat.

Karena bagaimana pun, yang namanya pemberdayaan perempuan tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada penopang dan penyokong dari pihak lain yang berkaitan. Pemberdayaan perempuan ini adalah kewajiban dan tugas bersama, mulai dari lokal, nasional sampai internasional.

Di dunia internasional telah menyerukan pemberdayaan perempuan, sebagaimana tertuang dalam United Nation Millenium Declaration (2000), "*to promote gender equality and empowerment of women as effective ways to combat poverty, hunger and disease and to stimulate development that is sustainable*" (Darwin, 2005a).

Tidak terkecuali dengan Indonesia pemberdayaan ekonomi perempuan sudah menjadi perhatian sejak tahun 90-an. Menurut Musdah Muslia (2011), bahwa arah kebijakan pembangunan nasional menyangkut kedudukan dan peran perempuan mengacu pada dua hal pokok, *pertama*, meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan *gender*. *Kedua*, meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan, serta nilai historis perjuangan kaum perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan, serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Alasan lainnya kenapa dalam pemberdayaan perempuan membutuhkan kebersamaan dan kontribusi dari pemerintah daerah sampai pusat, karena menurut Gunawan Sumodiningrat (dalam A. A. Nugroho, 2008) pemberdayaan perempuan perlu perlindungan,

artinya mendapatkan proteksi dari kekerasan dan ketidakadilan. Begitupun dengan Rosemerie (dalam Achmad, 1994), bahwa untuk menjadi perempuan yang mandiri dengan cara menciptakan yang baru bagi keberadaan perempuan, menghapuskan yang tidak sesuai bagi perempuan, serta mereformasi yang tidak lurus bagi perempuan. Tentu ini tidak hanya bisa dilakukan oleh kelompok perempuan dan pendamping, tetapi juga aparat pemerintah daerah dan pusat.

Pemerintah berkontribusi dalam penciptaan iklim dan suasana kondusif dalam pemberdayaan perempuan. Seperti yang dikatakan Kartasasmita (1996) bahwa penting dalam pemberdayaan perempuan, yaitu: *pertama, enabling*, yaitu proses menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi perempuan berkembang. *Kedua, empowering*, yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki perempuan. *Ketiga, protecting*, yaitu upaya mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Termasuk juga dalam urusan pengawasan pada setiap program dan strategi pemberdayaan ekonomi perempuan yang sedang dilaksanakan.

Intinya, pemberdayaan ekonomi adalah kapasitas perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi, berkontribusi dan mengambil manfaat dari proses pertumbuhan dengan cara yang mengakui nilai kontribusi mereka, menghormati martabat mereka dan memungkinkan untuk merundingkan distribusi manfaat pertumbuhan yang lebih adil (Eyben et al., 2008).

Ekonomi pemberdayaan meningkatkan akses perempuan ke sumber daya dan peluang ekonomi termasuk pekerjaan, jasa keuangan, properti dan aset produktif lainnya, pengembangan keterampilan dan informasi pasar. Partisipasi dan pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan hal mendasar untuk memperkuat hak-hak perempuan dan memungkinkan perempuan untuk memiliki kendali atas kehidupan mereka dan memberikan pengaruh dalam masyarakat (Network, 2011).

Ini adalah tentang menciptakan masyarakat yang adil dan setara.

Wanita sering menghadapi diskriminasi dan ketidaksetaraan gender yang terus-menerus, dengan beberapa wanita mengalami banyak diskriminasi dan pengucilan karena faktor-faktor seperti etnis atau kasta. Pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan pro-miskin dan pencapaian semua Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan katalisator untuk melipatgandakan upaya pembangunan. Investasi dalam kesetaraan gender menghasilkan keuntungan tertinggi dari semua investasi pembangunan (Manning, 2010).

Wanita biasanya menginvestasikan proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan mereka dalam keluarga dan masyarakat daripada pria. Sebuah penelitian di Brazil menunjukkan bahwa kemungkinan kelangsungan hidup seorang anak meningkat sebesar 20% ketika ibu mengendalikan pendapatan rumah tangga (Lal, 2016).

Meningkatkan peran perempuan dalam perekonomian merupakan bagian dari solusi krisis keuangan dan ekonomi dan penting untuk ketahanan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pada saat yang sama, kita perlu menyadari bahwa perempuan dalam beberapa konteks menanggung biaya pemulihan dari krisis, dengan hilangnya pekerjaan, kondisi kerja yang buruk, dan meningkatnya kerawanan.

Beberapa isu yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi perempuan sangat menantang atau sensitif. Tantangan-tantangan ini perlu diakui dan didiskusikan. Dibutuhkan kebijakan yang sehat, pendekatan holistik dan komitmen jangka panjang dari semua pelaku pembangunan untuk mencapai pemberdayaan ekonomi perempuan. Ini tidak akan pernah menjadi “perbaikan cepat”.

a. *Hak vs. “ekonomi pintar”*

Dalam beberapa tahun terakhir banyak donor (baik bilateral maupun multilateral) telah mendekati pekerjaan kesetaraan gender mereka dari perspektif “pengembalian tinggi” dari bantuan investasi pada perempuan dan anak perempuan, yang mencerminkan “ekonomi

pintar” dari Rencana Aksi Gender Bank Dunia. Apa yang disebut pendekatan “instrumentalis” ini sering disajikan sebagai lawan langsung, atau melemahkan, pendekatan “hak”/keadilan sosial. Praktik yang baik dalam pertumbuhan yang berpihak pada kaum miskin adalah tentang menangani tujuan-tujuan ini sebagai tujuan yang saling mendukung dan bukannya saling eksklusif. Misalnya, hak-hak ekonomi perempuan dapat diperkuat dengan memperbaiki kerangka administrasi dan hukum nasional yang berkaitan dengan tanah, warisan dan hak milik.

b. *Menjangkau yang termiskin dari yang miskin dan perempuan di komunitas terpencil.*

Bukti menunjukkan bahwa donor dan kerjasama multilateral berjuang dengan aspek pemberdayaan ekonomi perempuan dan cenderung ke arah pendekatan seperti skema kredit mikro atau mendukung pengusaha perempuan yang akan tetap berhasil. Tantangannya adalah untuk menjangkau perempuan miskin yang menjadi buruh tak bertanah, produsen pertanian kecil, pedagang lintas batas dan pekerja pabrik dan rumah tangga dan memastikan bahwa perempuan ini memiliki akses ke peluang dan manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Ada tantangan khusus ketika bekerja dengan perempuan termiskin seperti: tingkat melek huruf yang lebih rendah, tingkat akses yang lebih rendah ke dan kontrol atas sumber daya, tingkat akses yang lebih rendah ke jaringan dan orang-orang yang dapat membantu dan mendukung, kerentanan yang lebih besar terhadap eksploitasi dan pelecehan seksual di tingkat masyarakat, jika bukan tingkat rumah tangga (Mayoux, 2011). Kendala tersebut mengharuskan donor untuk mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan termiskin dalam desain program, termasuk investasi di bidang infrastruktur, seperti jalan dan telekomunikasi.

c. *Apakah cukup yang dilakukan untuk menghidupi petani dan suaminya?*

Sebagai petani, pengolah dan pedagang, perempuan memasok berbagai macam barang ke pasar lokal, regional dan internasional (Farnworth et al., 2016). Persepsi yang bertahan lama tentang petani

sebagai laki-laki - di hadapan semua bukti yang bertentangan - merupakan hambatan penting bagi peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Bertahannya ketidaksetaraan gender secara langsung menghasilkan hasil pertanian dan pembangunan manusia yang lebih buruk. Sebuah studi yang dilakukan di empat negara Afrika menunjukkan bahwa menyediakan petani perempuan dengan kuantitas dan kualitas input yang sama dengan yang biasanya diterima laki-laki, dan meningkatkan akses mereka ke pendidikan pertanian, dapat meningkatkan hasil dan pendapatan pertanian nasional sekitar 10% hingga 20% (Skagerlind, 2021).

d. *“Memilih pemenang” bukan satu-satunya cara untuk mendukung pengusaha perempuan*

Beberapa donor bilateral dan multilateral dan penyandang dana sektor swasta telah memprioritaskan dukungan untuk pengusaha perempuan. Dengan meningkatnya urbanisasi, banyak daerah pedesaan di negara-negara Afrika dan di tempat lain menjadi lebih berorientasi pasar. Menghubungkan produsen pedesaan ke pasar perkotaan adalah salah satu cara donor dan pemerintah dapat memperluas peluang bisnis perempuan. Namun, ketika merancang program, para donor perlu bertanya: akankah dukungan untuk usaha perempuan menghasilkan peningkatan kesempatan kerja dan wirausaha bagi perempuan yang hidup dalam kemiskinan - atau akankah itu hanya menguntungkan mereka yang akan tetap makmur?

e. *Berikan kredit kepada perempuan*

Keuangan mikro - termasuk kredit mikro - sering dianggap sebagai instrumen yang mempromosikan pemberdayaan. Meskipun dapat menstabilkan mata pencaharian, memperluas pilihan, menyediakan dana awal untuk investasi produktif, membantu orang miskin untuk memperlancar arus konsumsi dan menyekolahkan anak, hal ini juga dapat menyebabkan hutang dan peningkatan pengecualian kecuali jika program dirancang dengan baik.

Memberikan layanan tambahan - seperti pelatihan, bekerja melalui kelompok daripada individu, atau di samping investasi lain dalam peningkatan kesadaran - telah terbukti meningkatkan kontrol



langsung perempuan atas sumber daya (Desai, 2010).

Untuk meningkatkan aktivitas perempuan yang menghasilkan pendapatan dari tingkat kelangsungan hidup menjadi bisnis yang kuat dan layak, perempuan membutuhkan akses ke berbagai layanan dan fasilitas kredit, perbankan dan keuangan, yang penting untuk sepenuhnya mengembangkan aset produktif, tanah, dan bisnis mereka. Bank di negara berkembang sering memiliki praktik pemberian pinjaman yang konservatif. Akibatnya, usaha kecil milik perempuan menghadapi kesulitan mengakses kredit yang dibutuhkan untuk berinvestasi dalam memperluas kegiatan mereka. Intervensi inovatif telah mendorong sektor keuangan untuk memberikan produk yang responsif gender.

## BAB V

### PENUTUP

Kondisi keluarga di Jawa Barat meningkat dari prasejahtera menjadi sejahtera. Peningkatan ini pun meningkatkan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Namun hal itu diiringi dengan adanya peningkatan problematika keluarga, seperti kasus kekerasan seksual, KDRT, dan kasus perceraian. Tampaknya ini bermula dari penghormatan terhadap perempuan itu sendiri, yang kini keberadaannya semakin menguat dengan banyaknya pekerjaan yang dapat dimasuki oleh kaum perempuan.

Namun tidak semua begitu. Perempuan melakukan sebagian besar pekerjaan perawatan yang tidak dibayar di semua ekonomi dan budaya. Di banyak masyarakat, norma-norma yang ada menyatakan bahwa anak perempuan dan perempuan memiliki tanggung jawab utama untuk merawat anak-anak, orang tua dan orang sakit, serta untuk menjalankan rumah tangga, termasuk penyediaan air dan pasokan energi. Hal ini melemahkan peluang mereka untuk bersekolah atau mampu menerjemahkan hasil dari pekerjaan produktif mereka sendiri menjadi pendapatan yang meningkat dan lebih terjamin, dan kondisi kerja yang lebih baik.<sup>38</sup> Beberapa pekerjaan perawatan yang tidak dibayar, seperti merawat anggota keluarga, dihargai oleh mereka yang melakukannya tetapi banyak hal lain yang menjemukan, seperti pengumpulan air dan bahan bakar. Peningkatan penyampaian, dan akses ke layanan publik, seperti klinik kesehatan dan transportasi umum juga dapat mengurangi beban waktu yang dihadapi perempuan (Fälth & Blackden, 2009).

Pekerjaan perempuan yang tidak dibayar, khususnya di bidang ekonomi perawatan, perlu mendapat perhatian lebih besar dari para donor. Mengurangi dan mendistribusikan kembali pekerjaan perempuan yang tidak dibayar dengan meningkatkan akses ke infrastruktur dan teknologi adalah satu aspek tetapi bukan keseluruhan cerita. Norma-norma sosial yang diskriminatif juga perlu ditangani.<sup>40</sup> Dan perlu ada peningkatan pengakuan dan penilaian terhadap cara-cara di mana pekerjaan perawatan mendukung ekonomi yang berkembang. Rancangan kebijakan dan program donor dapat mengatasi masalah ini secara lebih memadai dengan: menyoroti dan membantu mengubah sikap dan nilai yang menempatkan tanggung jawab utama untuk rumah dan perawatan anak-anak, orang sakit dan orang tua pada perempuan dan anak perempuan, merancang dan membiayai sosial transfer (seperti Bantuan Tunai Bersyarat) yang menangani ketidaksetaraan hubungan gender dalam pengasuhan, mendukung investasi dalam infrastruktur seperti air dan sanitasi, serta teknologi domestik yang mengurangi elemen pekerjaan perawatan yang memakan waktu, mengembangkan layanan yang ada, seperti pra-kesehatan dan pendidikan sekolah, koordinasi dukungan untuk survei penggunaan waktu dan survei angkatan kerja rumah tangga sehingga ada informasi yang lebih akurat tentang kontribusi perempuan pada ekonomi formal dan informal, termasuk ekonomi perawatan.

Mengendalikan ekonomi keluarga dengan baik sangat penting agar tidak berakhir dengan uang di akhir bulan. Sebuah keluarga yang diatur dengan benar dapat menghemat sedikit uang setiap bulannya. Penting untuk tidak tetap di nol atau bahkan, dalam kasus terburuk, untuk mencapai utang berlebih.

Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat perencanaan pengeluaran. Oleh karena itu, disarankan untuk mengingat uang yang dibayarkan dan uang yang dikeluarkan setiap bulan. Menghilangkan pengeluaran-pengeluaran wajib seperti menyewa rumah atau membayar cicilan, gas, air, listrik, telepon, dll. Uang yang tersisa itulah yang harus Anda kerjakan. Membeli tanda putih adalah nasihat lain yang baik untuk memperhitungkan dalam hal makanan yang bersangkutan,

pengeluaran harus dilakukan setiap hari. Merek-merek ini biasanya cukup terjangkau, lebih dari yang terkenal di pasaran. Faktanya, banyak dari mereka memiliki kualitas yang sama karena diproduksi oleh merek dagang paling terkenal. Anda harus menghilangkan pengeluaran yang berlebihan setiap hari. Disarankan untuk berjalan kaki daripada naik bus atau taksi, sarapan dan selalu makan di rumah jika memungkinkan atau membawa makanan ke tempat kerja. Hindari makan di luar setiap hari, singkirkan beberapa saluran TV berbayar yang tidak sering terlihat, dll. Pada saat akan melakukan pembelian makanan, Anda tidak pernah harus melakukannya sebelum makan. Hal ini menunjukkan bahwa kelaparan menyebabkan pengeluaran untuk makanan meningkat, yang akan menyebabkan ketidakseimbangan anggaran ekonomi keluarga bulanan. Saran terakhir kami, dan mungkin salah satu yang paling penting, pembelian harus dilakukan secara tunai atau dengan kartu debit. Penggunaan kartu kredit dapat menyebabkan kita menghabiskan lebih dari yang sebenarnya kita mampu.

Tenaga kerja perempuan Jawa Barat masih kalah bersaing dengan tenaga kerja laki-laki di berbagai bidang pekerjaan. Baik dari segi kualitas maupun kuantitas pendidikan dan *skill* perempuan masih tertinggal dengan tenaga kerja laki-laki. Tenaga kerja perempuan masih banyak yang menempati posisi-posisi pekerjaan di bawah laki-laki.

Memang, di tingkat dunia, krisis keuangan, pangan dan bahan bakar baru-baru ini telah menyebabkan perhatian baru para donor untuk pertanian, ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan. Perempuan adalah pemain utama di bidang pertanian, yang merupakan mayoritas petani dan buruh tani di banyak negara. Perempuan menghasilkan sebagian besar makanan yang dikonsumsi secara lokal dan bertanggung jawab atas ketahanan pangan rumah tangga di banyak daerah pedesaan. Akses yang lebih adil terhadap tanah, pupuk, air untuk irigasi, benih, teknologi, peralatan, peternakan dan layanan penyuluhan akan membuat pertanian menjadi sarana yang lebih efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bersama,

mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan dan mata pencaharian pedesaan (Buvinic et al., 2010).

Namun, dibandingkan dengan laki-laki, perempuan:

- a. mengoperasikan peternakan yang lebih kecil,
- b. memelihara lebih sedikit ternak,
- c. biasanya dari jenis yang lebih kecil, dan mendapatkan lebih sedikit dari ternak yang mereka miliki,
- d. memiliki beban kerja keseluruhan yang lebih besar yang mencakup kegiatan dengan produktivitas rendah seperti mengambil air dan kayu bakar,
- e. memiliki lebih sedikit akses ke inovasi dan aset dan jasa produktif, jauh lebih kecil kemungkinannya untuk membeli input seperti pupuk, benih unggul dan peralatan mekanik,
- f. memiliki hak kepemilikan dan jaminan kepemilikan yang lebih lemah dan insentif yang berkurang untuk berinvestasi di tanah mereka,
- g. kurang terwakili dalam kepemimpinan organisasi pedesaan, terutama di tingkat regional dan nasional,
- h. jika dipekerjakan, lebih cenderung bekerja paruh waktu, musiman dan bergaji rendah,
- i. menerima upah yang lebih rendah untuk pekerjaan yang sama, bahkan ketika mereka memiliki pengalaman dan kualifikasi yang sama.

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian, menutup kesenjangan gender di bidang pertanian akan menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi sektor pertanian dan masyarakat. Jika perempuan memiliki akses yang sama ke sumber daya produktif seperti laki-laki, mereka dapat meningkatkan hasil pertanian mereka sebesar 20-30%. Hal ini dapat meningkatkan total hasil pertanian di negara-negara berkembang sebesar 2,5-4%, yang pada gilirannya dapat mengurangi jumlah orang yang kelaparan di dunia sebesar 12-17%. Penelitian yang dilakukan oleh Bill & Melinda Gates Foundation juga menunjukkan bahwa dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam program pengadaan dan dukungan petani kecil, perusahaan pangan

internasional dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman, menumbuhkan basis pasokan petani kecil, dan meningkatkan akses ke pasar bernilai tinggi (Chan & Barrientos, 2010).

Banyak pengusaha perempuan di negara berkembang menghadapi hambatan yang tidak proporsional dalam mengakses dan bersaing di pasar. Ini termasuk relatif kurangnya mobilitas, kapasitas dan keterampilan teknis perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki (Bank Dunia, FAO dan IFAD, 2009).

Rencana Aksi Bank Dunia (2006) Kesetaraan Gender sebagai Ekonomi Cerdas berpendapat bahwa pemberdayaan ekonomi adalah tentang membuat pasar bekerja untuk perempuan dan memberdayakan perempuan untuk bersaing di pasar. Karena pasar datang dalam berbagai bentuk, Rencana Aksi menargetkan empat pasar utama: pasar tanah, tenaga kerja, keuangan dan produk (meningkatkan akses ke layanan bisnis dan memfasilitasi penciptaan bisnis milik perempuan).

Di mana globalisasi telah memperlebar jurang antara kaya dan miskin, ada bukti bahwa perempuan dan anak-anak yang paling terpengaruh. Resesi ekonomi global telah berdampak besar pada produsen miskin. Para donor dapat membantu memastikan bahwa globalisasi dan liberalisasi perdagangan menguntungkan semua - baik perempuan maupun laki-laki. Hambatan saat ini termasuk beberapa kebijakan dan peraturan perdagangan, kurangnya infrastruktur ekonomi dan akses terbatas ke pasar ekspor. Pada tahun 2007-2008 hanya 12% dari total bantuan untuk kebijakan dan peraturan perdagangan yang menargetkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Ferrant & Thim, 2019). Intervensi donor harus responsif terhadap rezim perdagangan dan investasi internasional dan dapat, misalnya, mendukung inisiatif perdagangan yang adil.

Pekerjaan yang produktif dan pekerjaan yang layak di negara-negara berkembang, termasuk dalam konteks yang rapuh, merupakan jalan keluar utama dari kemiskinan baik bagi perempuan maupun laki-laki. Partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja dapat ditingkatkan dengan mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi perempuan

dalam mengakses pekerjaan, termasuk program pekerjaan publik, dan dengan memberikan pelatihan kejuruan yang terfokus. Langkah-langkah perlindungan sosial dapat meningkatkan produktivitas dan partisipasi perempuan miskin di pasar tenaga kerja dengan mengurangi kerentanan mereka terhadap risiko mata pencaharian dan guncangan ekonomi. Perempuan mengalami hambatan di hampir setiap aspek pekerjaan – termasuk: apakah mereka telah membayar pekerjaan sama sekali, jenis pekerjaan yang mereka peroleh atau yang dikecualikan, ketersediaan layanan dukungan seperti pengasuhan anak, upah mereka, tunjangan dan kondisi kerja, ketidakamanan pekerjaan atau perusahaan mereka, akses mereka ke pelatihan kejuruan (ILO, 2009; Karna, 2020).

Namun demikian, ada beberapa strategi alternatif dalam pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis keluarga, di antaranya: pemanfaatan sumber daya alam dan sosial lokal, adanya tim pendamping, dan pembentukan sekolah perempuan.

Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sosial lokal, dengan dimulai dari pembentukan kelompok produksi atau komunitas, identifikasi sustainable SDA, menentukan alternatif pengembangan, pelatihan Sumber Daya Manusia baik yang berupa *soft skill* maupun *hard skill*, dan manajemen produksi, melakukan koordinasi dari pusat sampai tingkat desa, kemudian ada regulasi dan terobosan dari dinas KUMKM, Industri dan perdagangan, dan dinas sosial.

Kemudian, untuk memberdayakan perempuan, diperlukan adanya tim pendamping, monitoring dan evaluasi setiap kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan. Pemberdayaan perempuan memiliki lebih dari satu komponen: hak mereka untuk mengambil keputusan; akses mereka ke peluang dan sumber daya; wewenang untuk mengatur kehidupan mereka sendiri, baik di dalam maupun di luar rumah. Pemberdayaan perempuan memiliki banyak dimensi yang melekat padanya. Ini berkisar pada akses ke pengetahuan, kepemilikan sumber daya sosial dan ekonomi dan lebih banyak otonomi dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Semua komponen dan dimensi pemberdayaan perempuan ini saling

terkait dan perubahan pada satu komponen tidak akan membawa transformasi yang besar kecuali semua komponen berubah.

Jika perempuan lebih produktif seperti laki-laki, dan kedua gender bekerja secara bersamaan untuk kemajuan negara, itu akan mengarah pada jalan keluar yang berkelanjutan dari kemiskinan. Oleh karena itu perempuan juga harus mendapatkan kesempatan kerja yang sama. Tetapi perempuan memiliki tantangan yang lebih besar, karena mereka tidak mendapatkan kesempatan ekonomi yang sama dengan laki-laki. Mereka tidak mendapatkan akses terhadap kondisi kerja yang layak dan tertinggal dari laki-laki dalam pengambilan keputusan.

Perempuan untuk lebih diperkaya secara politik dan ekonomi harus mengangkat suara mereka, hanya kekuatan perempuan yang dapat mengubah struktur pengambilan keputusan, sistem pengambilan keputusan seperti itu harus diperkenalkan yang dapat membuat perempuan lebih partisipatif, ini akan mengubah agenda pembangunan dan perempuan akan bekerja sama dengan laki-laki untuk pembangunan. Langkah-langkah tersebut harus diambil untuk memberikan arti penting bagi perempuan yang kurang mampu karena perempuan adalah mayoritas dari mereka. Kemiskinan juga memainkan peran penting karena perempuan di negara-negara berkembang rendah, yang tidak terpelihara dengan baik, bagaimana mereka bisa menyuarkan hak-hak mereka. Untuk menghilangkan disparitas gender dan memberdayakan perempuan, kita harus mendistribusikan kembali sumber daya dan menghapus praktik-praktik yang diskriminatif tersebut.

Pemberdayaan gender berarti bahwa perempuan harus mendapatkan kesetaraan di bawah hukum dan harus dilaksanakan dan ditegakkan. Pemberdayaan perempuan pada dasarnya mengandung keadilan hukum, akses yang sama terhadap pendidikan dan latihan praktis, manajemen perempuan di tingkat nasional, tindakan positif untuk pekerjaan dengan upah yang sama, dan sistem peradilan yang peka gender.

Pemberdayaan adalah inti dari pekerjaan sosial. Pekerja sosial berusaha untuk memberdayakan individu sehingga mereka dapat



mengatasi tantangan pribadi seperti penyalahgunaan zat atau gangguan makan, penyakit pribadi atau keluarga, dan trauma emosional akibat perceraian, pelecehan atau kematian orang yang dicintai. Namun, pekerjaan sosial tidak hanya berfokus pada individu. Ini juga bertujuan untuk memberdayakan kelompok dan komunitas, terutama mereka yang memiliki sejarah penindasan dan marginalisasi. Pekerjaan sosial dapat—dan harus—melibatkan advokasi untuk kebijakan yang mempromosikan keadilan dan kesetaraan sosial yang lebih besar.

Pekerja sosial menggunakan berbagai metode praktik dan teori. Misalnya, teori pemberdayaan, pekerjaan sosial berfokus pada peningkatan pengembangan diri dan kesadaran serta membantu orang mengatasi kekuatan opresif yang menghalangi mereka untuk berkembang.

Terakhir, adalah pembentukan sekolah perempuan dan pusat-pusat pelatihan di tiap-tiap daerah di wilayah Jawa Barat. Rekomendasi ini mendapat banyak dukungan teoretis. Para ekonom membedakan manfaat individu pribadi seperti itu dari manfaat sosial di mana yang terakhir diperoleh orang lain daripada mereka yang dididik. Teori Modal Manusia (Schultz, 1961) mendalilkan bahwa kuantitas dan kualitas pendidikan yang diperoleh seseorang berkontribusi pada nilai atau modal manusianya, yang mengarah pada kapasitas produktif yang lebih besar. Dan, akhirnya, diasumsikan bahwa kapasitas produksi tercermin dalam pendapatan yang lebih tinggi selama periode karir jika tidak segera setelah lulus. Jelas, modal manusia individu tergantung pada berbagai faktor selain pendidikan (seperti kesehatan, motivasi, kemampuan bawaan, dan status sosial ekonomi).

Sebagian besar studi tentang manfaat ekonomi pendidikan cenderung berkonsentrasi hampir secara eksklusif pada efek pendidikan pada produktivitas, atau pendapatan, laki-laki dalam angkatan kerja, dan kurang memberikan bobot pada manfaat ekonomi dari pendidikan perempuan. Sudah diketahui dengan baik bahwa pendidikan juga mempengaruhi pendapatan perempuan. Wanita dengan pendidikan yang lebih tinggi atau kualifikasi yang lebih

tinggi memperoleh penghasilan lebih banyak daripada wanita dengan kualifikasi yang lebih rendah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketika perempuan memperoleh penghasilan tunai, maka status dan daya tawar mereka dalam keluarga meningkat (Swamy, 2004). Mungkin sulit untuk mengukur nilai ekonomi pendidikan bagi perempuan-perempuan yang tidak dibayar, tetapi mereka tetap berkontribusi sedikit pada perekonomian nasional. Misalnya, pendidikan seorang ibu dapat bermanfaat bagi pencapaian pendidikan anak-anaknya di masa depan, dan ini mungkin merupakan hasil yang sangat diinginkan dalam jangka panjang sebagai manfaat ekonomi tidak langsung yang penting dari pendidikan.

Peran pemberdayaan pendidikan perempuan tidak hanya mempengaruhi kehidupan perempuan, tetapi juga kehidupan anak-anak mereka dan tanggungan lainnya - seperti orang tua. Pendidikan - terutama pendidikan profesional dan teknis - juga kemungkinan akan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan dengan membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengambil kesempatan kerja yang dibayar. Di tingkat nasional, mendidik perempuan telah menghasilkan peningkatan produktivitas, peningkatan pendapatan dan pembangunan ekonomi, serta kualitas hidup yang lebih baik, yang mengarah pada populasi yang lebih sehat dan bergizi lebih baik (King & Mason, 2001)“mendeley”:{“formattedCitation”:(King & Mason, 2001).

Baru-baru ini, permintaan akan tenaga kerja terampil telah meningkat secara signifikan sebagai akibat dari globalisasi, perubahan teknologi, dan sebagai akibat dari reorganisasi kerja. Proses pengembangan keterampilan di sektor informal di negara berkembang lebih penting karena lembaga pelatihan formal tidak memiliki kapasitas untuk melatih sejumlah besar calon. Oleh karena itu, pendidikan terbuka dan jarak jauh menjadi alat yang tak terelakkan untuk menyediakan pendidikan dan pelatihan berbasis keterampilan.

Bukti penelitian juga menunjukkan bahwa “perempuan dengan pendidikan lebih atau kualifikasi yang lebih tinggi memperoleh pendapatan rata-rata lebih banyak daripada perempuan dengan

tingkat pendidikan minimum” (Gaba, 2011). Di seluruh dunia, gerakan peningkatan status perempuan selalu menekankan pendidikan sebagai instrumen paling signifikan untuk perubahan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, S. (1994). *Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan*. Kantor Menteri UPWRI.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2017*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2018). *Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2018*. BPS Jawa Barat.
- Berger, P. L. (1979). *The Sacred Sanopy*. Doubleday.
- Buvinic, M., Lunde, T., & Sinha, N. (2010). Investing in gender equality: looking ahead. *AFTER*, 275.
- Chambers, R. (1987). *Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang*. LP3ES.
- Chan, M.-K., & Barrientos, S. (2010). Improving Opportunities for Women in Smallholder-based Supply Chains: Business case and practical guidance for international food companies. *Prepared for the Bill & Melinda Gates Foundation, Available From*.
- Darwin, M. (2005a). *Memanusiakkan Rakyat: Penanggulangan Kemiskinan sebagai Arus Utama Pembangunan*. Penerbit Benang Merah.
- Darwin, M. (2005b). *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*. Graha Guru.
- Desai, M. A. (2010). Hope in hard times: Women's empowerment and human development. *UNDP-HDRO Occasional Papers, 2010/14*.

- Eddyono, Wiyanti, S., Fanani, E., Sabaniah, D. A., Maurice, Y., Ghazali, H., Warlif, J., Velayati, S., & Ciciek, F. (2006). *When and Why the State Responds to Women's Demands: Understanding Gender Equality Policy Change in Indonesia*. UNRISD.
- Enjang, & Dulwahab, E. (2018). *Komunikasi Keluarga Perspektif Islam*. Simbiosia.
- Eyben, R., Kabeer, N., & Cornwall, A. (2008). Conceptualising empowerment and the implications for pro poor growth. *DAC Poverty Network by the Institute of Development Studies, Brighton*.
- Fälth, A., & Blackden, M. (2009). *Unpaid Care Work. UNDP Policy Brief, Gender Equality and Poverty Reduction, Issue 1*. UNDP, New York, USA.
- Farnworth, C. R., Baudron, F., Andersson, J. A., Misiko, M., Badstue, L., & Stirling, C. M. (2016). Gender and conservation agriculture in East and Southern Africa: towards a research agenda. *International Journal of Agricultural Sustainability*, 14(2), 142-165.
- Febriyani, R., Rostika, I., & Rahman, M. T. (2020). *Peran Keluarga dan Bimbingan Sufistik dalam Mengembangkan Religiusitas Anak*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/33190>
- Ferrant, G., & Thim, A. (2019). *Measuring women's economic empowerment: Time use data and gender inequality*.
- Gaba, A. K. (2011). Women empowerment through professional and technical programmes. *Distances et Savoirs*, 9(1), 41-52.
- Galvin, K. M., & Brommel, B. J. (1996). *Family communication: Cohesion and change (4th ed.)*. Harper Collins College Publishers.
- Girvan. (2004). *Pemberdayaan*.
- Herri, D. (2009). *Implementasi Model Pengembangan Entrepreneur Perempuan Muda Pada Rumah Tangga Miskin di Sumatera Barat*. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Hikmat, H. (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama Press.

- Horton, P. B., & Hunt, C. L. (1996). *Sosiologi Edisi Keenam (Alih bahasa oleh Aminudin Rahman dan Tito Sobari)*. Penerbit Erlangga.
- Humas. (2016). *Ketahanan Keluarga, Alat Perangi Narkotika. Jabarprov.Go.Id.*
- Huriani, Y., Rahman, M. T., & Haq, M. Z. (2021). Developing Gender-Based Justice Relationships in Indonesian Families During the COVID-19 Pandemic. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(1), 76–95.
- ILO. (2009). Gender equality at the heart of decent work. *World of Work*, 4–7.
- Indahyani, Erma, D., & Sulistyani, R. B. (2004). Pengaruh bahan pit dan fisur silen glass ionomer terhadap dekalsifikasi email. *Repository.Unej.Ac.Id.*
- Karna, S. K. (2020). Productivity Analysis of Beauty Parlour: With reference to women economic empowerment in Butwal. *Butwal Campus Journal*, 2(1), 24–33.
- Kartasasmita, C. (1996). Masalah Asma Pada Anak di Indonesia. *Simposium KONIKA X*, 380–390.
- Khairuddin. (2000). *Sosiologi Keluarga*. Liberty Yogyakarta.
- King, E., & Mason, A. (2001). *Engendering development: Through gender equality in rights, resources, and voice*. The World Bank.
- Lal, B. S. (2016). Economic Empowerment of Tribal Women: A Study in Telangana State. *Social Sciences International Research Journal*, 2, 407–415.
- Mahmud, T. A. (2020). LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN (LKPj) GUBERNUR BANTEN PERIODE 2012-2017 (Suatu Tinjauan). *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 3(1), 76–87.
- Manning, R. (2010). The impact and design of the MDGs: some reflections. *IDS Bulletin*, 41(1), 7–14.

- Mayoux, L. (2011). Taking gender seriously: Towards a gender justice protocol for financial services. In *The handbook of microfinance* (pp. 613–641). World Scientific.
- Moser, C. (1989). Gender Planning in the Thirrd World: Meeting Practical and Strategic Needs. *World Development*, 17(18).
- Murniati, N. P. (2001). *Gerakan Ekonomi Perempuan Sebagai Basis Ekonomi Rakyat: Sebuah Refleksi Pengalaman Lapangan*. PT. Bina Rena Pariwara.
- Musdah, M. (2011). *Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi*. Naufan Pustaka.
- Network, O.-D. G. E. (2011). *Women's economic empowerment. Issues paper*. Paris: OECD-DAC Gender Equality Network (GENDERNET). <https://www.oecd.org> ....
- Nugroho, A. A. (2008). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)*. FIA UB.
- Nugroho, R. (2008). *Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Pranarka, & Prijono. (1996). *Pemberdayaan (Empowerment). In Pemberdayaan, Konsep Kebijakan dan Implementasi*. CSIS.
- Purnawati, T. (2017). Banyak Perempuan Bekerja Pengaruhi Tingginya Angka Perceraian? *Pikiranrakyat.Com*.
- Saleha, E., & Tirtariandi, A. E. Y. (2015). Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Indonesia menyongsong MEA. *Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1–17.
- Setyowati, D. (2018). Tujuh Bidang Pekerjaan Akan Tetap Eksis di Era Digital. *Katadata.Co.Id*.

- Skagerlind, H. H. (2021). Governing development: global performance indicators and gender policy change in Sub-Saharan Africa. *Journal of International Relations and Development*, 1-27.
- Sukezi, K. (1999). Beberapa Alat Kajian Jender dalam Pembangunan. *Kajian Jender Dalam Pendidikan Dan Pengajaran Malang*.
- Summit, M. (2000). *United nations millennium declaration* (U. Nations (ed.)).
- Susilo, B. (2010). Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Tani Berbasis Kelembagaan. *Jurnal MUWAZAH*, 2(2), 287-300.
- Swamy, G. (2004). International trade and women. *Economic and Political Weekly*, 4885-4889.
- Tangdilintin, P. (2005). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Yayasan Obor Indonesia.
- Verderber, R. F., & Verderber, K. S. (1998). *Inter-Act: Using Interpersonal Communication Skills*. Wadsworth Publishing Company.
- Wahyuni. (1990). *Mobilitas Wanita di Daerah Pedesaan Suatu Studi Kasus di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta*. UGM.
- Wamboldt, F. S., & Reiss, D. (1989). Defining a Family Heritage and a New Relationship Identity: Two Central Tasks in the Making of a Marriage. *Family Process*, 28(3), 317-335. <https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.1989.00317>.
- Widaningroem, R., Saksono, H., & Kanoni, S. (1999). Strategi Wanita dalam Mata Rantai Perdagangan Hasil Perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Gender*, 1(1).





## TENTANG PENULIS

Nama	: Yeni Huriani
Nip	: 196301121992031001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat tanggal Lahir	Majalengka, 12 Januari 1963
Status Pernikahan	Menikah
Agama	Islam
Golongan/Pangkat	IV/b (Pembina)
Jabatan Fungsional Akademik	Lektor Kepala pada Fakultas Ushuluddin
Perguruan Tinggi	UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Alamat	Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung 40614
Alamat Rumah	Jl. Pasir jati Timur no. 5 Rt. 01/04 Jati Endah, Bandung
Email	<a href="mailto:yenihuri@yahoo.com">yenihuri@yahoo.com</a> / <a href="mailto:yenihuriani@uinsgd.ac.id">yenihuriani@uinsgd.ac.id</a>

### RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan	Perguruan Tinggi	Jurusan/Bidang Studi
1988	S1	IAIN SGD Bandung	Perbandingan Agama
2001	S2	UI Jakarta	Kajian Wanita
2016	S3	UIN SGD Bandung	Religious Studies

### PELATIHAN PROFESSIONAL

Tahun	Jenis Pelatihan	Penyelenggara	Jangka Waktu
1994	Participatory Rural Appraisal (PRA)	Yayasan Mandiri - GTZ Germany	3 Minggu

1996	English for Academic Purposes	Pusat Bahasa IAIN SGD Bandung	6 Bulan
1997	Higher Education System	ICIHEP- Mc-Gill University	5 Bulan
2010	Course on Human Trafficking	IOM-FBI Legat Jakarta	1 Minggu

### PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/ Program Studi	Semester/Tahun Akademik
Orientalisme/ Oksidentalisme	S1	UIN SGD Bandung/ Perbandingan agama	VI/ 1994 - sekarang
Agama dan Masalah Gender	S1	UIN SGD Bandung/ Sosiologi Agama	IV/ 2004 - 2012
Psikologi Umum	S1	UIN SGD Bandung/ Tafsir hadits & PA	II/ 2013 - sekarang
Psikologi Agama	S1	UIN SGD Bandung/ Perbandingan Agama	III & IV/ 2002- sekarang
Psikologi Agama	S2	UMY kelas Cirebon	II/ 2005 - 2007
Agama dan Kesehatan Reproduksi	S1	UNPAD Bandung/ FK- Kebidanan	I/ 2012 - 2019
Agama dan Jender	S2	PPs UIN SGD Bandung	2019 - sekarang
Agama dan Isu-Isu Kontemporer	S3	PPs UIN SGD Bandung	2017 - sekarang

Agama dan Resolusi Konflik	S3	PPs UIN SGD Bandung	2018 - sekarang
----------------------------	----	---------------------	-----------------

### PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/ Anggota	Sumber dana
2019	Pendampingan Komunikasi Terapeutik terhadap Korban Kekerasan Seksual	Ketua	DIPA - BOPTAN UIN SGD TA. 2019
2018	Strategi Penguatan Ekonomi Perempuan Berbasis Keluarga	Ketua	Biro Bangyan-sos - Setda Prov. Jabar 2018
2018	Komunikasi Terapeutik Pasca Kekerasan Seksual	Anggota	DIPA - BOPTAN UIN SGD TA. 2018
2017	Nilai Islam dalam Pengalaman Kesehatan Reproduksi Perempuan Kampung Naga Tasikmalaya	Ketua	DIPA - BOPTAN UIN SGD TA. 2017
2016	Meningkatkan Daya Saing Masyarakat Jawa Barat Melalui Ketahanan Keluarga	Anggota	BAPUSIPDA Prov. Jawa Barat
2015	Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Jawa Barat: Mencari akar penyebab dan alternative solusi	Individual	DIPA - BOPTAN UIN SGD TA. 2015
2015	Sinergitas P2TP2A Provinsi Jawa Barat dengan P2TP2A Kota/Kabupaten dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual pada Anak	Anggota	P2TP2A Jawa Barat
2014	Wacana Politik Islam substatif Indonesia	Individual	DIPA - BOPTAN UIN SGD TA. 2014
2013	Perempuan dan Pengambilan Keputusan: Studi pada TKW di Kabupaten Sukabumi	Individual	DIPA - BOPTAN UIN SGD TA. 2013

2012	Pemberdayaan Perempuan Pemulung di Kampung Cibogo Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung (Penelitian dan Pendampingan)	Ketua	LPPM UIN SDG
------	--	-------	-----------------

## KARYA TULIS ILMIAH

A. Buku/Bab Buku/Jurnal		
Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2021	Takhrij and Syarah Hadith of Agrotechnology Utilization of Empty Land.	<i>Gunung Djati Conference Series</i> (Vol. 1, pp. 231-237).
2021	Takhrij and Syarah of Chemistry: The Efficacy of Honey to Cure Disease.	<i>Gunung Djati Conference Series</i> (Vol. 5, pp. 158-164).
2021	The Phenomenon of Design Thinking of Niqab Fashion Trends Inspiration of Hadith.	<i>Gunung Djati Conference Series</i> (Vol. 4, pp. 1-13).
2021	Developing Gender-Based Justice Relationships in Indonesian Families During the COVID-19 Pandemic.	<i>Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak</i> , 3(1), 76-95.
2021	Agama dan Gender: Versi Ormas Islam Perempuan di Indonesia.	Lekkas, Bandung. ISBN. 978-623-6207-06-2
2021	Perempuan dan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Mantan Para Pekerja Perempuan di Kota Bandung.	<i>Journal of Society and Development</i> , 1(2), 46-58.
2021	Toleransi Beragama dan Harmonisasi Sosial.	Lekkas, Bandung. ISBN. 978-623-6207-29-1
2020	Urgensi penjelasan keagamaan terhadap keluarga suspek Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19	<i>Jurnal Hanifiya</i> PPs UIN SGD Bandung (Vol. 3, No. 1, 2020)

2020	Decision Making Process of Women Migrant Workers in West Java: The Intertwine of Religion, Culture, and Social Reality	Jurnal <i>Wawasan</i> Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung (Vol. 5, No. 1, 2020)
2019	Pendampingan Komunikasi Terapeutik pada Korban Kekerasan Seksual	Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung. ISBN 978-623-7036-88-3
2018	Komunikasi Terapeutik Pasca Kekerasan Seksual	Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung. ISBN 978-623-7036-21-0
2017	Reinterpretasi Asbāb Al-Nuzūl bagi Penafsiran Alquran	Jurnal <i>Wawasan</i> Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung (Vol. 2, No. 1, 2017)
2017	Women's Reproductive Experiences: Islamic Values on Local Wisdom at Kampung Naga, West Java	ScitePress, <i>2nd International Conference on Sociology Education - Volume 2: ICSE</i> , ISBN 978-989-758-316-2. ISSN 2184-2728,
2012	Penafsiran Kontemporer Al-Qur'an terhadap Isu-Isu Hak Asasi Manusia (HAM) Perempuan	ILMU USHULUD-DIN (Jurnal Him-punan Peminat Ilmu-Ilmu Ushulud-din (HIPIUS) UIN Jakarta
2012	Ensiklopedi Gender	Iris Press – Bandung ISBN: 978-979-3053-17-2
2008	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik	Jurnal LEGISLASI INDONESIA, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Depkumham RI (Vol.5 No. 3. September 2008)

2007	Ketakutan Terhadap Feminisme	Jurnal KHAZANAH, Program Pascasarjana UIN SGD Bandung (Vol. 4, No. 12, Juli - Desember 2007)
2006	Memahami Studi Wanita dan Wacana Feminisme dalam Islam	Jurnal KHAZANAH, Program Pascasarjana UIN SGD Bandung (Vol. 3, No. 10, Juli - Desember 2006)

### Kegiatan Professional/Pengabdian Kepada masyarakat

Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Tempat
2019	Pendampingan Korban Kekerasan Seksual	Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat
2017	Memahami Kesehatan Reproduksi: Penyuluhan Kesehatan Reproduksi sebagai Upaya pencegahan seks bebas dan Pernikahan Dini	Kegiatan Non-Kurikuler Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung
2014	Advokasi Anak-anak Korban Kekerasan Seksual Sodom	Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung
2013	In-Service Trauma Healing Perempuan Korban Perkosaan	Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat
2012	Pemberdayaan Perempuan Pemulung di Kampung Cibogo Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung	Ciparay, Kabupaten Bandung

### JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

Peran/Jabatan	Institusi	Tahun
Ketua Jurusan	Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN SGD Bandung	1999 - 2003

Wakil Ketua	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat	2010 -2019
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Pimpinan Pusat	Wanita Persatuan Ummat Islam (PUI)	2010 - 2015
Dewan Pakar Pimpinan Pusat	Wanita Persatuan Ummat Islam (PUI)	2015 - 2020
Ketua Div. Pendidikan	Majelis Nasional FORHATI-KAH-MI	2018 - 2022



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Encep Dulwahab, S.Sos., M.I.Kom
Tempat Tanggal Lahir	: Subang, 18 Maret 1978
Kebangsaan	: Indonesia
Status Marital	: Menikah dan Memiliki 2 anak
Agama	: Islam
Alamat Rumah	: Jalan Babakan Sari RT 01/08 Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, 40615 e-mail: encepdulwahab@gmail.com HP : 08122269738 Jl. A.H. Nasution No. 105 Kota Bandung, 40614
Alamat Kantor	
<b>Pendidikan</b>	
1991	: SDN Martadinata Subang
1994	: SMPN 2 Subang
1997	: SMUN 24 Bandung
2003	: S 1 Ilmu Jurnalistik UIN Bandung
2013	: S 2 Ilmu Komunikasi Unpad
2021	: S 3 Ilmu Komunikasi Unpad

<b>Pengalaman Kerja:</b>	
2000-2004	: Interviewer di riset pasar di Insight, JRI, dan AMI
2004 - 2009	: Editor di Penerbit Mizan
2009-Sekarang	: Editor dan penulis lepas
2003-Sekarang	: Dosen Ilmu Komunikasi UIN SGD Bandung
2010-Sekarang	: Konsultan publishing house
2012 - Sekarang	: Konsultan media
2013-2015	: Konsultan dan tim kajian Bappeda Jawa Barat
2016 -Sekarang	: Auditor Komunikasi Organisasi
2018 -Sekarang	: Tim kajian Kesra Pemprov Jawa Barat

### **Penelitian:**

2003	:	Pergeseran Orientasi Pemberitaan Pers di Era Orde Baru
2013	:	Jurnalisme Damai dalam Pemberitaan Konflik
2014	:	Kode Etik Narasumber
2015	:	Pembingkajian Media dalam Konflik Suriah
2016	:	Pandangan Mahasiswa terhadap Acara Keagamaan di TV
2017	:	Implementasi Manajemen Mutu KBIH
2018	:	Komunikasi Terapeutik pada Korban Kekerasan Seksual
2019	:	Konsep Diri Jamaah Haji Indonesia
2020	:	Komunikasi Keluarga TKW di Pesisir Jawa Barat
2021	:	Komunikasi Lintas Budaya dalam Membangun Kerukunan Masyarakat Jawa Barat

### **Buku dan Karya Tulis lainnya:**

2008	:	Shalat is Fun (Mizan Publishing House)
2009	:	Cara Praktis Jadi Penulis Hebat di Arsad Press
2012	:	Melawan Hegemoni Media di Arsad Press
2013	:	Marketing Yourself di Arsad Press

2015	:	Ensiklopedi Tafsir terbit di Malaysia
2000- sekarang	:	Menulis artikel dan feature di media cetak dan on line: Gala Media, Pikiran Rakyat, Kompas Jabar, Tribun Jabar, Republika, Koran Sindo, Majalah Cahayaku Hongkong, Ayo Bandung, Kabarindah.com, madania.com.
2003- sekarang 2016	:	<i>Ghost writer</i> di beberapa penerbit Kontributor dalam Komunikasi di tengah Perubahan (ASPIKOM dan Pelangi Publika)
2017	:	Psikologi Komunikasi Jemaah Haji di Kementerian Agama RI Komunikasi Nonverbal Jemaah Tabligh (Jurnal Communicatus, Sinta 2)
2018	:	Komunikasi Keluarga Perspektif Islam (Simbiosis Reka Tama)
2019	:	Komunikasi Terapeutik pada Korban Kekerasan Seksual (LP2M UIN Bandung) Transformasi Konsep Diri Jemaah Haji Indonesia (Jurnal Inferensia, Sinta 2) Jurnalisme di Masa Pandemi
2020	:	Komunikasi Keluarga Pada Keluarga Transisi Subang (Lekkas) Strategi Komunikasi Terapeutik Kepada Korban Kekerasan Seksual (Jurnal Kajian Komunikasi Unpad)
2021	:	Media Strategy in Covering Religious Conflict ( <i>Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication</i> Jilid 37(2) 2021: 98-110)

### Modul, Bahan Ajar dan Hasil Kajian

2015	:	Modul Pedoman KKNI untuk Jurusan Komunikasi
2015	:	Kajian tentang MDGs to FDGs di Bappeda Jabar
2015	:	Kajian tentang Meningkatkan Kualitas SDM Jawa Barat dalam Menghadapi MEA di Bappeda Jabar

2015	:	Kajian tentang Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan di Pesantren di Bappeda Jabar
2015	:	Kajian tentang Sosialisasi Jabar Maju 2025 di Bappeda Jabar
2016	:	Kajian tentang Meningkatkan daya saing masyarakat Jawa Barat Berbasis Ketahanan Keluarga di Pusdalisbang Jabar
2016	:	Kajian tentang Starting Business in West Java di BPMPT Jawa Barat
2016	:	Kajian tentang Strategi Publikasi Geopark Ciletuh di BPMPT Jawa Barat
2017	:	Bahan Ajar tentang Pedoman Labolatorium Dakwah untuk PTKIN se-Indonesia di Kementerian Agama RI
2018	:	Kajian tentang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Berbasis Ketahanan Keluarga di Biro Yansos Pemprov Jawa Barat
2018	:	Kajian tentang Strategi Meningkatkan Tokoh Pahlawan Jawa Barat di Biro Kesra Jawa Barat
2020	:	Kajian tentang Meningkatkan Angka Partisipasi Asuransi Ketenagakerjaan di Jawa Barat di BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat

Bandung, 19 Juli 2021

**Encep Dulwahab, S.Sos., M.I.Kom**

## CURRICULUM VITAE

**Nablur Rahman Annibras, Lc. M. Hum**

Jln. Pasir Jati Timur No. 5 - Jatiendah - Cilengkrang - Bandung 401616

Phone : +6282218105262

E-mail : bluemummys@uinsgd.ac.id

### PERSONAL DETAILS

**NAME** : Nablur Rahman Annibras, Lc. M. Hum.

**PLACE/DATE OF BIRTH** : Bandung/ March , 12<sup>nd</sup> 1988

**GENDER** : Male

**RELIGION** : Moslem

**MARITAL STATUS** : Married

**NATIONALITY AND  
CITIZENSHIP** : Indonesian

**PRESENT LIVE STATUS** :Jln. Pasir Jati Timur no. 5 - Jatiendah -  
Cilengkrang - Bandung 40616

**EMAIL** : bluemummys@uinsgd.ac.id

**MOBILE PHONE  
NUMBER** : +6282218105262

### EDUCATION BACKGROUND

<b>University/ School</b>	<b>Discipline</b>	<b>Year</b>
Islamic State University (UIN) Syarif Hidayatullah	Program Doctoral of Tafsir and Quranic Science	2016 - Present
Islamic State University (UIN) Sunan Kalijaga	Program Magister of Qur'an and Hadits	2012 - 2014
Al Azhar University Egypt	Tafsir and Sciences of al- Qur'an	2007 - 2011
PM Darussalam Gontor		2000 - 2005

### ORGANIZATIONAL EXPERIENCES

<b>Position</b>	<b>Organization</b>	<b>Year</b>
Staff of Science Department	DPD Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Mansoura	2008-2009
Head of Group 15089/19	Koordinator Gerakan Pramuka PM Darussalam Gontor	2004-2005

Member	Darussalam Football Club - Gontor	2002-2005
Member	Pramuka Garuda – PM Darussalam Gontor	2002-2005

### **WORKSHOP**

Name of Seminar	Year	Participate as	Organized by
Post Graduate of Agama and Filsafat Conference	2012	Moderator	UIN Sunan Kalijaga
Dialog Nasional dan Kebangsaan with B.J Habibie	2011	Participant	KBRI Cairo
Workshop Sunni-Syi'ah	2010	Participant	DPD PPMI Mansoura
Workshop Power Point and Publisher	2010	Participant	DPD PPMI Mansoura
Workshop Studi al-Qur'an	2010	Organizing Comitee	DPD PPMI Mansoura
Kajian Ilmu Hadits	2009	Participant	DPD PPMI Mansoura
Talkshow “Menikah Muda Itu Indah”	2008	Participant	DPD PPMI Mansoura

### **JOB EXPERIENCE**

Name	Position	Year
Babussalam Islamic Boarding School - Tanjung Pura - Langkat	Teacher	2005-2006
Caior International Fair	Translator	2009
Bina Umat Islamic Boarding School Yogyakarta	Teacher	2012 - 2015
Universitas Muhammadiyah Bandung	Lecturer	2015 - 2021
HPI Div. Arabic Language	Tourist Guide	2016 - Present
UIN SGD Bandung	Lecturer	2015 - Present

